



LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan
Perizinan dan Nonperizinan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

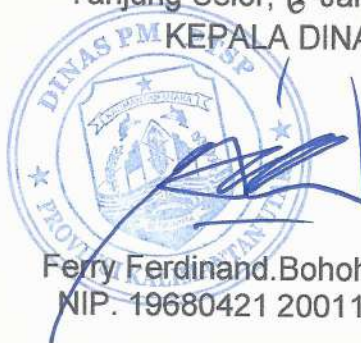
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024.

Bahwa Laporan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik merupakan dokumen implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai Jumlah Pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, yang masuk melalui mekanisme Pengaduan langsung dan tidak langsung.

Demikian Laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran data dan informasi terhadap Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tanjung Selor, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS,



Ferry Ferdinand.Bohoh, ST,MT
NIP. 19680421 200112 1 002

DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Maksud Dan Tujuan	1
Dasar Hukum Kelembagaan dan Pelaksanaan Pelayanan	1

Bab II MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Tim Pelaksana.....	3
Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	3
Kewajiban Pengelola Pengaduan	3
Laporan Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	4

Bab III HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

5

Bab IV PENUTUP

6

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara sebagai Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perizinan, terus melaksanakan terobosan dalam meningkatkan pelayanan, keseriusan ini ditunjukkan dengan pengembangan aplikasi Sistem Perizinan Online Kalimantan Utara (PESONA) sehingga memudahkan masyarakat dalam memproses izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam berkontribusi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusun laporan penanganan pengaduan pelayanan publik adalah sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Penanganan Pengaduann Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan utara dalam melayani masyarakat yang mengalami kendala/hambatan saat melakukan proses layanan perizinan dan non perizinan.

Adapun tujuan penyusunan pengelolaan penanganan pengaduan pelayanan publik ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan pelayanan publik yang dilakukan oleh Tim pengelolaan pengaduan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian tindaklanjut pengaduan.

1.3 Dasar Hukum Kelembagaan dan Pelaksanaan Pelayanan

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara dalam memproses permohonan penerbitan surat izin atau rekomendasi di dukung dengan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 900/143/DPMPTSP.IV/2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

2.1 Tim Pelaksana

Tim pelaksana pengelolaan penanganan pengaduan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 900/143/DPMPTSP.IV/2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

2.2 Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan

Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Informasi yang disampaikan, baik perorangan dan/atau lembaga, keluarga yang berasal dari pegawai yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai DPMPTSP Provinsi Kalimantan utara yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh pegawai.

Adapun bentuk pengaduan perizinan dan non perizinan merupakan penyampaian aduan atas terjadinya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu:

1. Pengaduan secara langsung

Pengaduan secara langsung adalah masyarakat atau pelaku usaha datang langsung ke pusat informasi dan pengaduan (*Helpdesk*) yang tersedia pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan langsung keluhan, hambatan dan ketidakpuasan saat melakukan kepengurusan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, baik secara lisan atau dengan mengisi form pengaduan.

2. Pengaduan secara tidak langsung

Pengaduan secara tidak langsung adalah pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha melalui Kotak Pengaduan atau media elektronik seperti : Telepon, SMS, Whatsapp, Website dan email dan lainnya.

2.3 Kewajiban Pengelola Pengaduan

Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparaturnya yang menangani laporan pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berperilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta

menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan dalam penanganan laporan pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan. Adapun pengelola wajib memberikan pengaduan dengan:

- a. Empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan
- b. Cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif, dan tidak memungut biaya
- c. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Memberikan penjelasan secara transparan tentang perkembangan proses pengaduan yang ditangani
- e. Mengedepankan prinsip profesionalitas dan independensi dalam mengelola pengaduan
- f. Memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.

2.4 Laporan Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelaolaan Pengaduan Pelayanan Publik, pengelola penanganan pengaduan pelayanan publik wajib melaporkan pengelolaan pengaduan kepada penyelenggara secara berkala. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Pemohon Izin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara telah berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selaku pemohon izin, serta mengimplementasikan pelayanan prima di semua bidang dan unit kerja dalam berbagai layanan kepada semua pemohon izin.

Laporan pengaduan yang disampaikan oleh pemohon izin akan kami tindaklanjuti secepat mungkin dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pencatatan serta memberi tanggapan kepada pengadu. Jika pengaduan disampaikan terkait dengan pertimbangan teknis (Pertek) yang menjadi wewenang OPD teknis, penyaluran pengaduan akan meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun berbagai macam pengaduan yang diadukan oleh pemohon izin di tahun 2024 dengan masing-masing sektor dan sudah ditindaklanjuti pada form tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi kalimantan utara tahun 2024.

BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan pengaduan dalam kurun waktu Januari tahun 2024 s.d. bulan Desember tahun 2024, antara lain :

1. Masih banyaknya pemohon izin yang belum paham terhadap Teknologi Informasi;
2. Hasil telaah Substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP
3. Masih banyaknya laporan yang dikelola oleh masing-masing OPD Teknis dan hasil penanganan pengaduannya belum dilaporkan

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan antara lain:

1. Melakukan pendampingan dan berbantuan terkait Teknologi Informasi
2. Melakukan pelayanan jemput bola kepada masyarakat;
3. Melakukan studi banding terkait penanganan pengaduan Perizinan dan Non Perizinan ke Kabupaten / Kota lain
4. Terus melakukan monitoring berkala untuk mendisiplinkan penyampaian informasi berkala dan informasi lain guna mendukung keterbukaan informasi ke masyarakat

Laporan pengaduan pelayanan publik yang masuk segera ditindaklanjuti oleh tim penanganan pengaduan agar kedepannya penyelenggara pelayanan publik semakin baik dan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu masyarakat puas dengan layanan yang diterima dan semakin mengerti bahwa setiap proses penerbitan izin pasti ada konsekuensi yang harus diterima masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan taat pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Layanan informasi perlu ditingkatkan terus agar masyarakat sadar dan mengerti bahwa setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan wajib dilengkapi dengan Izin Resmi yang diterbitkan oleh Aplikasi OSS melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara agar usaha tersebut dinyatakan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil monitoring penanganan pengaduan pelayanan publik selama tahun 2024 ditemui adanya aduan dan konsultasi pelayanan publik yang masuk sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pengaduan langsung dan tidak langsung. dimana media pengaduan yang digunakan Email, WhatsApp dan Form Pengaduan yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.

Penyelenggaraan penanganan pengaduan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta Front Office yang sudah mendapat pelatihan/bimtek Exelent Service. Informasi pengaduan (Help Desk) yang memuat nomor telepon dan lain-lain bagi masyarakat sebagai pelaku usaha dipublikasikan melalui media website, Instagram dan Facebook. Hal ini dilakukan untuk membuka ruang publik pengaduan bagi masyarakat sehingga mudah menyampaikan kendala dan hambatan dalam melakukan proses perizinan dan non perizinan.

Laporan Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas kinerja pelayanan publik dan perbaikan penyusunan oleh tim pengelolaan pengaduan ditahun depan.

**DOKUMENTASI LAYANAN PENANGANAN PEGADUAN
PELAYANAN PUBLIK**

**Mekanisme Pengaduan Langsung
dengan mengisi Form Pengaduan**



@<https://dpmptsp.kaltaraprov.go.id/>

**Rapat Penyelesaian Penanganan
Pengaduan Pelayanan Publik**



@<https://dpmptsp.kaltaraprov.go.id/>



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lantai I, Kode Pos 77212
Telp/Fax 0552 -2029748 Email : dpmptsp.provkaltara@gmail.com
Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 900/43 /DPMPTSP.IV/2024**

TENTANG

**TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengantisipasi adanya permasalahan dalam penanganan di bidang pengaduan layanan perizinan dan non perizinan maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non perizinan;
 - b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara tentang tim penanganan pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 08 Tahun 2013 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Bappeddandan Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretarian daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penanganan pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan pengaduan layanan perizinan dan non perizinan Kalimantan Utara;
 - Mengkaji permasalahan pengaduan dan memberikan alternative saran dan masukan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
 - Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dengan permasalahan/pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan Penanganan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman

Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun
Anggaran 2024;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 28 Februari 2024



KEPALA DINAS

Ferry Ferdinand Bohoh, S.T., M.T
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680421 200112 1 002

Lampiran

Nomor : 900/143 /DPMPTSP.IV/2024
Tentang : TIM PENANGANAN PENGADUAN

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ferry Ferdinand B, S.T.,M.T. NIP. 19680421 200112 1 002	Kepala Dinas DPMPTSP Prov.Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
2.	Radiah BT Yolohio, S.H., M.AP NIP. 19731002 200604 2 012	Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan NonPerizinan	Ketua Tim
3.	Hendra Bastian, SE NIP. 19750807 201001 1 003	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
4.	Suyanto, S.IP., M.AP NIP. 19690519 198902 1 001	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi Penanaman Modal dan Kerjasama	Anggota
5.	Drs. Junaid NIP. 19671231 199312 1 004	Kepala bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi	Anggota
6.	Erfany Camil Nur,S.E NIP. 19760925 200312 1 003	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
7.	David Gunawan, S.Hut.,M.AP NIP. 19780912 201001 1 015	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
8.	Dedy Setiawansyah, ST., M.AP NIP. 19791205 200502 1 002	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota

9.	Alvian Utama, S.IP NIP. 19930923 201802 1 001	Analisis Investasi Daerah	Anggota
10.	Andi Asri, S.H NIP. 19900626 202012 1 014	Analisis Hukum	Anggota
6.	Novia Anastasiah, S.S	Staf Non ASN	Anggota
7.	Ira Lisiana, S.Sos	Staf Non ASN	Anggota
8.	Dinarti, SE	Staf Non ASN	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 28 Februari 2024



KEPALA DINAS,

Eddy Ferdinand Bohoh, S.T., M.T
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680421 200112 1 002

FORM TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN DAN KONSULTASI MASYARAKAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA PELAPOR / PELAKU USAHA & NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL PENGADUAN / KONSULTASI	MEDIA	LOKASI/JENIS USAHA	PERMASALAHAN	TANGGAPAN TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	JUPRI (08125363865)	9 JANUARI 2024 Pkl.14.34 PM	WhatsApp		Apa persyaratan bidang angkutan laut dengan KBLI 50133, karena menurut info dari PTSP Tarakan menjadi wewenang Provinsi?	Bagian Back Office membantu menjawab konsultasi via WhatsApp (WA) HP center Bid.Perizinan dengan menanyakan izin pengangkutan apa, lalu dijawab izin pengangkutan barang (bbm, barang perdagangan, mesin). Setelah mengetahui barang khusus yang mau diangkut, pihak DPMPTSP Prov.Kaltara mengarahkan untuk mengakses langsung persyaratannya di oss.go.id dan dipersilahkan menyesuaikan lagi untuk pemilihan KBLI-nya.	Telah selesai ditindaklanjuti pada tanggal 9 Januari 2024 Pkl. 14.47 PM
2.	ACONG & JONI (KEPALA DESA & SEKRETARIS DESA LIUK BULU)	16 JANUARI 2024 Pukul. 15.00 PM	SECARA LANGSUNG	KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI, KABUPATEN NUNUKAN	Mengkonfirmasi tindaklanjut proposal permohonan penyelenggaraan penataan ruang dan penetapan lokasi permukiman penduduk yang masuk ke DPMPTSP Prov.Kaltara tanggal 2 Januari 2024 dengan perihal lampiran surat permohonan pelepasan (legalitas tanah) dari pemilik area konsensi yaitu PT.Adindo Hutani Lestari kepada	Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara diwakili Sekretaris Dan Kabid Kajian Kebijakan & Pengaduan Layanan Perizinan Dan Non Perizinan Prov.Kaltara menemui Kepala Desa & Seketaris Desa Liuk Bulu dengan memberi penjelasan bahwa proposal yang masuk sebaiknya disampaikan / diperuntukkan langsung ke Gubernur Kalimantan Utara dengan membuat surat perihal permohonan pelepasan tanah dari Desa Liuk Bulu, Kec.Sembakung Atulai, Kab.Nunukan	Telah ditindaklanjuti pada tanggal 16 Januari 2024 Pukul 15.00 – 15.30 PM, di Kantor DPMPTSP Prov.Kaltara

					Pemerintah Daerah Prov.Kaltara agar pembangunan pemerintah dapat masuk di wilayah Desa Liuk Bulu (surat ditujukan kepada Bupati Kab.Nunukan)	sehingga nanti Gubernur Kalimantan Utara dapat memberikan disposisi surat yang ditujukan kepada yang beliau anggap dapat memberikan tindak lanjut terhadap surat proposal permohonan tersebut, mengingat rencana relokasi Desa Liuk Bulu masuk dalam kawasan HGU PT.Adindo Hutan Lestari (AHL) sehingga pengalihan kawasan hutan dibawah 5 Ha dengan ijin Gubernur.	
3.	AYU INDRIYANI (082254756055)	18 JANUARI 2024 Pukul. 14.12 PM	WhatsApp		Apa saja syarat untuk membuat surat izin usaha di PTSP (Izin Usaha Jualan Kue Kering)	Pengajuan izin usaha jualan kue kering melalui OSS (Online) dengan menggunakan KBLI 2020 (47242), diarahkan untuk mengakses melalui oss.go.id	Konsultasi Telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP Center Bidang Perizinan tanggal 18 Januari 2024 Pkl. 14.56 PM
4.	Pht. PAK SAFARI PERTAMEDIKA (081350453853)	25 JANUARI 2024 Pukul. 10.58 AM	WhatsApp	Tarakan	Bertanya tentang perpanjangan ijin pengambilan air bawah tanah, persyaratannya / form perpanjangan apakah bisa di share? Lokasinya di Rs Pertamina Tarakan	Untuk persyaratan bisa langsung diakses di laman oss.go.id, masuk di PB-UMKU, pengajuannya juga melalui OSS. Karena lokasinya ada di Tarakan maka sekarang mejadi kewenangan pusat, untuk kewenangan provinsi yang masuk wilayah sungai di Bulungan saja (sungai kayan)	Telah ditindaklanjuti pada tanggal 25 Januari 2024, pukul.11.12 AM via HP Center Bidang Perizinan
5.	DENNIS FERNANDO LEONARDI (089507504805)	30 JANUARI 2024 Pukul. 12.48 PM	WhatsApp		Dalam hal suatu perusahaan memiliki HGB atas suatu bidang tanah, saya memahami bahwa hak atas tanah tersebut haknya memberikan kepemilikan atas tanag dan seluruh bangunan yang dibangun diatasnya. Namun, dalam hal akan dilakukan penggalian atas tanah tersebut untuk pembangunan bendungan maka hasil dari galian tersebut merupakan milik	1. Boleh, dengan catatan tidak untuk komersil dan di atas lahan milik sendiri, apabila dilakukan untuk komersil harus mengurus izin terlebih dahulu; 2. Tidak ada, karena tidak ada unsur komersialisasi di dalamnya, tapi alangkah lebih baiknya tim teknis dari dinas terkait (Dinas ESDM Prov.Kaltara) melakukan peninjauan ke lapangan untuk	Konsultasi telah ditindaklanjuti melalui HP center bidang pengaduan, dengan berkoordinasi dengan bagian Back Office Bidang Perizinan pada tanggal 30 Januari 2024, pukul 14.22 - 15.45 PM

					negara. Berdasarkan hal tersebut pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah kegiatan penggalian dan penggunaan batu-batuan diatas area HGB tersebut dapat dilakukan mengingat kegiatan ini Tidak ada, karena bukan kegiatan komersil? 2. Apakah terdapat ketentuan dari Kemenkeu mengenai kompensasi pemanfaatan material tanah dan batu dalam rangka non komersial baik pembayaran dilakukan kepada negara atau pemerintah daerah?	memastikan kondisi kasus yang disebutkan.	
6.	MUGHNY APRIANDI RACHIM (081254131969)	6 Februari 2024 Pukul. 10.11 AM	WhatsApp	Universitas Muhammadiyah Makassar	Bertanya terkait kontak yang bisa dihubungi untuk masalah Surat Keterangan Penelitian tugas akhir yang lokasi penelitian tepatnya di Bulungan. Kemarin sudah menghubungi Kasbang Pol Bulungan jawaban nya tidak mengeluarkan surat rekomendasi penelitian tapi langsung diarahkan ke instansi tempat meneliti	Kalau Untuk Tugas akhir mahasiswa Prov dan Kab tidak mengeluarkan Rekomendasi. Jadi, DPMPTSP Prov/Kab hanya mengeluarkan Rekomendasi Surat penelitian kepada pihak swasta yang ingin mengajukan penelitian di Kaltara. Mahasiswa yang ingin meneliti di Kaltara untuk kepentingan Tugas akhir kami tidak keluarkan rekomendasi, baik lokasi penelitiannya instansi pemerintah maupun swasta (kalau mahasiswa tidak perlu).	Konsultasi telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP Center Bidang Perizinan pada tanggal 6 Februari 2024, pukul. 10.11 AM – 10.21 AM

7.	ICHA (085398331373)	7 Februari 2024 Pukul. 10.12 AM	WhatsApp		Kalau mau buat perizinan apotek alurnya perizinan bagaimana ya? Mohon arahannya.	Pengajuannya melalui OSS (online), jika mengalami kendala bisa langsung ke PTSP Kabupaten karena merupakan kewenangan PTSP Kabupaten.	Konsultasi telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP center Bidang Perizinan pada tanggal 7 Februari 2024, pukul 11.26 AM
8.	SB BORNEO INDAH 2 (081211126637)	19 Februari 2024 Pukul. 11.13 AM	WhatsApp	Tarakan	Kenapa tanggal berlaku tidak berubah dan tetap dikasih keluar pada Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau (SB.Borneo Indah 2), minta tolong dikoreksi tanggal berlakunya	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan Danau SB. Borneo Indah 2 yang dikeluarkan DPMPTSP Provinsi masih bersifat sementara jadi hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 (mengikuti sertifikat keselamatan).	Pengaduan telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP center Bidang Pengaduan pada tanggal 19 Februari 2024, Pukul 12.13 PM
9.	LILI.S (081159921111)	19 Februari 2024 Pukul. 13.59 PM 23 Februari 2024 Pukul. 13.07 PM	WhatsApp		1. Perusahaan jpt apa bisa tambah KBLI lagi? 2. Untuk PT baru buat ijin usaha 49432 (Angkut iso tank isi LNG) kbli ini syaratnya apa aja?	1. tidak bisa, JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) masuk single purpose; 2. silakan di cek di oss, tersedia disitu. dilengkapi saja persyaratannya, karena kebetulan merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk KBLI tsb.	Konsultasi telah ditindaklanjuti via HP center Bidang Perizinan pada tanggal 19 Februari 2024, pukul 14.30 PM & tanggal 23 Februari 2024, pukul 14.25 PM
10	FACHRY AIE (082328602237)	29 Februari 2024 Pukul. 19.44 PM	WhatsApp		Mau konsultasi masalah perizinan generator set 250 kva	Untuk perizinan IO 250 kVa hanya dalam bentuk laporan saja yang disampaikan ke dinas ESDM Prov.Kaltara. Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara lalu memberikan nomor kontak pegawai Dinas ESDM yang menangani bidang tersebut untuk berkonsultasi lebih lanjut terkait format dan prosedurnya.	Konsultasi telah ditindaklanjuti via WhasApp HP center Bidang Perizinan, tanggal 1 Maret 2024, pukul 08.24 AM

11.	JURDA – CV. Beringin Satu Perkasa (082112873727)	8 Maret 2023, Pukul. 13.34 PM	WhatsApp	Tarakan	Menanyakan terkait status verifikasi dari kelengkapan pemenuhan syarat untuk izin berusaha KBLI 49431-angkutan bermotor untuk barang umum. Sudah upload berkasnya dari bulan 11 tahun 2023. Di oss saya cek sampai sekarang status nya masih belum terverifikasi. Apakah bisa dibantu untuk perizinan tersebut proses nya sudah sampai mana? Karena kalau misalnya memang ada yang salah dari berkas saya upload, saya bisa tau berkas mana saja yang salah. NIB Perusahaan saya itu 1254000330498 CV. Beringin Satu Perkasa.	Setelah dilakukan pengecekan oleh bagian Back Office DPMPTSP Prov.Kaltara, permohonan tsb belum masuk ke sistem DPMPTSP Prov.Kaltara, kemungkinan masih di posisi dinas teknis dalam hal ini Dishub Prov.Kaltara. Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara lalu membantu memberikan info kontak pegawai Dishub Prov.Kaltara yang menangani Bidang terkait, untuk bisa menanyakan lebih lanjut status yang masih belum terverifikasi di OSS.	Pengaduan telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP center Bidang Pengaduan, tanggal 8 Maret 2024, Pukul. 14.30 PM
12.	BDT (085247315788)	13 & 14 Maret 2024 Pukul. 13.46 PM & Pukul. 08.06 AM	WhatsApp		Mau mendaftar izin galian c. Saya milih penggalian batu, pasie dan tanah liat lainnya (08109), untuk komoditas tanah timbunan dan batu. Lalu saya sudah bikin perseroan perorangannya, sertifikatnya juga sudah ada. Mohon dipandu untuk pengisian data usahanya	Setelah dilakukan pengecekan KBLI ternyata beda komunitas (08105), kalau pilih IUP eksplorasi berarti harus ada WIUP dulu dan kalau langsung bisa SIPB untuk tanah urug, kalau batuan harus lewat WIUP. Kemudian harus membuat akun OSS baru dengan data sesuai sertifikatnya.	Konsultasi telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP center Bidang Perizinan tanggal 13 Maret -14 Maret 2024, Pukul. 14.06 PM & 08.27 AM
13.	HJ.NORLENA – NARAYA MEDIA CENTER (081253442468)	13 Maret 2024, Pukul. 15.06 PM	WhatsApp	Tanjung Selor	Bagaimana jika pembuat surat ijin sudah tidak bekerja lagi di Lab. Naraya dan ingin mencabut semua ijin jika masih terkait nama pembuat surat ijin yang sudah berhenti dan masih digunakan sampai sekarang	Kalau untuk pencabutan izin sepertinya agak sulit, karena atas nama PT, kalau perubahan bisa. Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara menyarankan untuk melakukan perubahan data usaha pada sistem OSS RBA.	Konsultasi telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP Center Bidang Perizinan tanggal 13 Maret 2024, Pukul. 15.08 AM

14.	WAHYU FAJAR (082152289136)	27 Maret 2024 Pukul. 09.44 AM	WhatsApp		Apakah pembuatan SIUP saya bisa di proses? Atau saya harus perpanjang dulu pas besarnya baru bisa di proses pembuatan SIUP nya? Karna pihak Syabandar sudah tidak bisa perpanjang pas besar jika tidak ada SIUP	Pembuatan SIUP akan diproses, akan tetapi nanti untuk pengurusan SIPI nya harus pakai pas besar yang masih berlaku, daripada nanti SIUPnya terbit pas besarnya masih mati nanti tidak bisa terproses, makanya pihak DPMPTSP Prov.Kaltara kasih info sekarang agar nanti dilakukan perpanjangan pasnya	Konsultasi telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP Perizinan tanggal 27 Maret 2024, pukul. 09.47 AM
15.	JAMALUDIN (08125554059)	27 Maret 2024 Pukul. 09.40 AM	WhatsApp	KECAMATAN SEMBAKUNG	Koordinasi & konsultasi terkait Penggunaan Kawasan Hutan untuk Buka Jalan Penghubung Antar Desa di Kec. Sembakung khususnya Jalan Desa Lubakan-Tagul-Pelaju-Tepian Mohon petunjuk dan pencerahannya untuk melengkapi kekurangan berkas yang pernah diajukan	Untuk kelengkapan berkasnya belum lengkap, karena pakta integritasnya belum ada. Pakta Integritas dalam bentuk Akta Notaril yang menyatakan sanggup: - Sanggup memenuhi semua kewajiban; - Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; - Tidak melakukan kegiatan dilapangan sebelum ada persetujuan dari Menteri; - Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel; - Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; - Melakukan permohonan persetujuansesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan - Siap menerima konsekuensi hukum apabila melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) s.d (f)	Konsultasi telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP cepter Bidang Perizinan, tanggal 28 Maret 2024 Pukul. 09.23 AM

						Dokumen/Surat Pakta Integritas dibuat sama seperti pernyataan komitmen, dibuat pernyataan bermaterai dengan 7 poin Pakta Integritas tersebut diatas.	
16.	RIF (081254966368)	1 APRIL 2024 Pukul. 08.50 AM	WhatsApp		Jika mencabut salah satu kegiatan usaha di oss dan ingin mengembalikannya dikarenakan ada proses perizinan PB-UMKU yang sedang berjalan pada no KBLI/kegiatan usaha tersebut apa bisa? mohon petunjuknya	Bagian Back Office DPMPTSP Prov.Kaltara menanyakan apakah izin tersebut sudah terbit? lalu dijawab onresult di sistem SEHATI, yang bersangkutan memproses terkait izin tarsus. Lalu ditanyakan kembali apa sudah dicabut izinnnya? Lalu dijawab, sudah dicabut namun yang bersangkutan lupa & keliru kemarin kalau ada masih nyangkut proses di menu PB-UMKU. Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara lalu menyarankan untuk langsung kontak tim OSS saja dengan melakukan panggilan video, dengan harapan bisa diberikan solusi, karena pihak DPMPTSP Prov.Kaltara tidak bisa mengembalikannya lagi ke sistem OSS.	Konsultasi telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP center Bidang Perizinan, tanggal 1 April 2024 Pukul. 09.09 AM
17.	FIQRI – PT.KPP (082284941347)	2 APRIL 2024 Pukul. 09.17 AM	WhatsApp		Untuk pengajuan KBLI 09900 Aktivitas Penunjang Pertambangan dan penggalian lainnya mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak... apakah isiannya membutuhkan PKKPR utk memperoleh KBLI 09900? Dengan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan (dalam rangka Pengangkutan Batubara). Hasil koordinasi dengan ESDM	PKKPR merupakan perizinan dasar/persyaratan dasar, jadi memang harus dilakukan pemenuhan. PKKPR terbitnya dari OSS, jadi kalau mau ditambahkan di aktenya disilahkan, setelah itu baru lakukan penambahan KBLI di OSS.	Konsultasi telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP center Bidang Perizinan, tanggal 2 April 2024 Pukul. 09.25 AM

					Kaltara, informasinya tidak perlu PKKPR. Namun saya diarahkan koordinasi dengan PTSP Kaltara lagi berkenaan dengan KBLI 09900, apakah cukup mengajukan dalam OSS RBA setelah dilakukan KBLI 09900 di tambahkan dalam akta perubahan atau perlu PKKPR terlebih dahulu?		
18.	AFFANDY (081253047718)	17 APRIL 2024 Pukul. 17.00 PM	WhatsApp	Tarakan	Bertanya tentang tanggal expire SIKPI Jembatan Rezky apa benar tidak sampai 1 (satu) tahun karena hanya berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 (pengurusan perpanjangan SIKPI dilakukan bulan April 2024)	Mengikuti masa berlaku yang lama, karena terlambat mengajukan perpanjangan sipki makanya menggunakan masa berlaku surut, jadi tidak sampai satu tahun. Untuk ke depannya kalau bisa sebelum habis masa berlaku sudah harus melakukan perpanjangan, agar masa berlaku tetap satu tahun.	Pengaduan telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP center Bidang Pengaduan, tanggal 18 April 2024 Pukul. 08.22 AM
19.	PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA (081351442374)	29 APRIL 2024 Pukul. 11.10 AM	WhatsApp		Panjang koridor yang diusulkan sepanjang 13 km, namun di SK tercantum hanya 6 km saja, mohon info dan koreksinya	Koridor sepanjang 6.625 km merupakan penggunaan bersama dengan PT. Inhutani jadi tidak dimasukkan lagi di SK Izin perusahaan. Yang dimasukkan hanya yang belum dibebani izin.	Pengaduan telah ditindaklanjuti via WhatsApp HP center Bidang Pengaduan, tanggal 29 April 2024 Pukul. 11.40 AM
20.	PT. DAMAI BANGUN JAYA (081345091709)	02 MEI 2024 Pukul. 10.56 AM	WhatsApp	Malinau	Konsultasi terkait persyaratan perubahan pemegang saham, ada perubahan pemegang saham, direksi dan susunan pengurus perusahaan (Untuk melengkapi data Minerba One Data Indonesia / MODI	Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara mempersilahkan untuk membuat permohonan langsung ke DPMPTSP Prov.Kaltara dengan permohonan bermaterai, namun dipersilahkan untuk mengirimkan permohonan melalui email/WA	Konsultasi telah ditindaklanjuti pada tanggal 2 Mei – 3 Mei 2024 Pukul. 10.57 AM & 16.03 PM

21.	NOVIA SARASWATI (085246659998)	06 MEI 2024 & 14 Mei 2024 Pukul. 14.03 PM & 09.39 AM	WhatsApp		Mohon informasi terkait izin SDA atas nama PT. Primatunas Kharisma & PT. Sentosa Suksesutama (masih terkendala masalah approve ijin dari pihak DPMPTSP Prov.Kaltara)	Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara menyampaikan informasi di tanggal 6 Mei 2024 bahwa ijin belum diapprove oleh atasan dan sampai di tanggal 14 Mei 2024 ijin juga masih belum diapprove oleh atasan (Kepala Dinas). Sudah dilakukan konfirmasi kembali ke atasan, hanya belum diapprove juga oleh atasan. Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan tersebut.	Pengaduan telah dikonfirmasi via HP Center Bidang Perizinan pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul. 14.13 PM dan tanggal 14 Mei 2024 pukul.09.42 – 10.43 PM <i>Status permohonan masih menunggu verifikasi / approve dari Kepala DPMPTSP Prov.Kaltara di aplikasi PESONA</i> <i>Ijin selesai di approve Kadis tanggal 08 Juli 2024 (Info dari Bagian Back Office Bidang Perizinan)</i>
22.	ANTI SIPA, PT. MITRA KARTIKA SEJATI (081377659440)	13 MEI 2024, Pukul. 08.56 AM	WhatsApp	Tarakan	Minta persyaratan izin penggunaan air tanah yang berlokasi di Tarakan (untuk air sumur)	Dulu memang menjadi kewenangan Provinsi namun dalam aturan yang sekarang Kota Tarakan menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat. Untuk permohonan dan persyaratan dapat diakses dan dimohonkan melalui laman oss.go.id Sedangkan kewenangan Provinsi yang sekarang hanya DAS Wilayah Sungai Kayan (Tanjung Selor, Bulungan)	Konsultasi telah ditindaklanjuti via HP center Bidang Perizinan pada tanggal 13 Mei 2024, Pukul. 09.02 AM
23.	RADIT (082154673390)	20 MEI 2024 Pukul. 09.35 AM	WhatsApp	Tanjung Selor	Apabila ingin membuka usaha bilyard, proses izin apa yang perlu dibuat (atas nama per-orangan atau atas nama Badan Usaha), karena rencana mau buka bilyard dengan 10 meja.	Untuk bilyard penganjuannya Online (melalui OSS) dengan proses membuat akun OSS dulu nanti setelah buat akun maka bisa ajukan permohonan bilyard tersebut. Apabila ingin membuka usaha bilyard atas nama per-orangan, maka cukup menyiapkan KTP, NPWP dan email	Konsultasi telah ditindaklanjuti pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul. 14.22 PM - 14.40 PM Via HP Center Bidang Perizinan

						dan jika atas nama badan usaha maka perlu membawa Akta pendirian dimana di dalam Akta tersebut sudah memuat usaha bilyard, serta NPWP badan usaha. Untuk rencana buka bilyard dengan 10 meja tidak masalah jika atas nama perorangan (kalau belum ada Badan Usaha).	
24.	SURYO LASTANDYONO (081311129665)	21 MEI 2024 Pukul. 14.08 PM	WhatsApp		Mohon info untuk pembuatan akun terkait permohonan rekomendasi gubernur kaltara (rekomendasi penggunaan kawasan hutan) dan apakah nanti rekomnya keluarnya dalam bentuk print out atau harus download di OSS?	Untuk rekomendasi penggunaan kawasan hutan langsung diajukan ke kekantor DPMPSTSP Prov.Kaltara dengan persyaratan administrasi yang tertera di form ceklis rekomendasi gubernur persetujuan penggunaan kawasan hutan (dikirimkan via WA) dan untuk surat rekomendasinya nanti keluarnya dalam bentuk print out, namun sebelumnya juga harus memiliki akun online OSS.	Konsultasi telah ditindaklanjuti via HP center Bidang Perizinan pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul. 14.57 PM – 15.23 PM
25.	CV. HALAWA AMANI (085236999951)	04 JUNI 2024 Pukul. 09.36 AM	WhatsApp		CV kami memiliki 6 unit usaha yang semua statusnya sudah NIB Terbit, tapi setiap didownload dokumen NIB selalu daftarnya cuma ada 5 unit usaha (NIB.2009220095401)	Silakan dicek ulang di akun CV.Halawa Amani, tadi coba cetak ulang dari akun DPMPSTSP Prov.Kaltara (Back Office) sudah muncul 6 KBLI di pencetakan NIB, yang tidak muncul KBLI 62019.	Pengaduan telah ditindaklanjuti via HP center Bidang Perizinan pada tanggal 04 Juni 2024 Pukul. 09.42 AM - 12.39 PM
26.	LUSICANTIKA (082297066139)	10 JUNI 2024 Pukul. 11.27 AM	WhatsApp	BULUNGAN	Terkait persyaratan rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan, apakah ada contoh format : 1. Persyaratan administrasi terdapat pada nomor 1. Surat permohonan bermaterai 2. Pakta integritas 3. Persyaratan teknis	Untuk Format Permohonan Tidak ada, bebas saja yang penting jelas isi permohonannya perihal apa dan tertuju kepada KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV KALTARA dan wajib bermaterai	Konsultasi telah ditindaklanjuti via HP Center Bidang Perizinan tanggal 10 Juni 2024, Pukul. 11.46 AM

						Poin 2 untuk Fakta Integritas bagi Instansi pemerintah hanya membuat surat pernyataan bermaterai dengan memuat point a - f (yang ada di persyaratan) Poin 3 (persyaratan teknis) Dalam bentuk file elektronik (Softcopy) dan dalam format Shapefile (Shp)	
27.	IMAN, PT. HARUSMAS AGRO UTAMA (085393131614)	10 JUNI 2024 Pukul. 15.24 PM	WhatsApp	SAMARINDA	Terkait pencabutan izin, PT. Harusmas Agro Utama menanyakan permohonan surat sanggahan yang telah disampaikan ke Biro Hukum pada tanggal 21 mei 2024 perihal penolakan izin usaha pertambangan PT.Harusmas Agro Utama oleh Dinas Teknis terkait (Dinas ESDM) melalui OSS.	Karena izinnya melalui OSS berarti untuk pencabutannya melalui OSS juga. Untuk info lebih lanjut ditangani oleh Bidang Dalak karena yang membidangi terkait pencabutan izin ada di Bidang Dalak. Namun jika ingin mengajukan kembali permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi PT.Harusmas Agro Utama, memang harus mulai dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) lagi.	Pengaduan telah ditindaklanjuti via HP center Bidang Perizinan tanggal 10 Juni 2024, Pukul. 15.40-15.57 PM Dan bertemu langsung dengan Staf PNS Bidang Dalak di Kantor DPMPTSP Prov. Kaltara untuk berkonsultasi.
28.	APRIL, TENGGAYU II (082250225220)	14 JUNI 2024 Pukul. 09.38 AM	WhatsApp	TARAKAN	Untuk kepengurusan SIKPI apakah tidak perlu melampirkan hasil cek fisik kapal? Karena di aplikasi OSS masih terdapat persyaratan, mohon arahan	Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara segera melakukan perbaikan persyaratan dengan melakukan penghapusan untuk persyaratan berita acara cek fisik (di aplikasi OSS)	Pengaduan telah ditindaklanjuti via HP center Bidang Perizinan tanggal 14 Juni 2024, Pukul. 10.48-11.07 AM

29.	HERDADI AM, PT. CITRA SAWIT LESTARI (081808161574)	14 JUNI 2024 Pukul. 08.37 AM	WhatsApp		Terkait permohonan sertifikat standar Usaha yang belum diverifikasi (KBLI 10431, Nomor Kegiatan Usaha 20240-1170-9164-9055-2816) Untuk submit datanya tanggal 08 Mei 2024 lalu diverifikasi oleh Dinas Perindustrian Prov.Kaltara, namun sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 belum diverifikasi oleh pihak DPMPTSP Prov.Kaltara.	Petugas Pusat Informasi Dan Pengaduan meneruskan Informasi Pengaduan ke Kepala Bidang Penanganan Pengaduan, setelah dilakukan pengecekan ke petugas back office melalui aplikasi PESONA, status permohonan PT. Citra Sawit Lestari masih menunggu verifikasi / approve dari Kepala Dinas. Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi, dan mengingatkan Kepala Dinas untuk memverifikasi / approve permohonan PT. Citra Sawit Lestari	Pengaduan telah ditindaklanjuti via HP center Bidang Pengaduan tanggal 14 Juni 2024, Pukul. 10.57 AM – 11.16 AM <u>Selesai di Verifikasi Kepala DPMPTSP Prov Kaltara tanggal 10 Juli 2024</u>
30.	ISAK, PT. TAMBANG NASIONAL INDONESIA (085255626569)	20 JUNI 2024 Pukul. 12.21 PM	WhatsApp		Konfirmasi Surat Pengantar Pendaftaran Minerba One Data Indonesia (MODI) PT.Tambang Nasional Indonesia di Kementerian ESDM yang sudah diserahkan permohonan nya ke DPMPTSP Prov.Kaltara tanggal 10 Juni 2024, a.n Hendriyanto (nomor: 0021217801062024036) Terkait permohonan MODI PT. Tambang Nasional Indonesia, sudah sementara diurus ke Kementerian ESDM. Tinggal melengkapi surat pengantar pendaftaran MODI yang dimohonkan ini. Mohon Informasi tindak lanjutnya.	Petugas Pusat Informasi Dan Pengaduan meneruskan Informasi Pengaduan ke Kepala Bidang Penanganan Pengaduan, setelah dilakukan pengecekan ke petugas back office melalui aplikasi PESONA, status permohonan PT. Tambang Nasional Indonesia masih menunggu verifikasi / approve dari Kepala Dinas. Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi, dan mengingatkan Kepala Dinas untuk memverifikasi / approve permohonan PT. Tambang Nasional Indonesia karena masih akan ada proses selanjutnya setelah Surat Pengantar Modi tersebut terbit.	Pengaduan telah ditindaklanjuti via HP center Bidang Pengaduan tanggal 20 Juni 2024, Pukul. 14.16 PM, Pemohonan Surat Pengantar MODI PT. Tambang Nasional Indonesia sudah diapprove / diverifikasi oleh Kepala DPMPTSP Prov.Kaltara melalui aplikasi PESONA

31.	YAYASAN BANGUN GENERASI UNGGUL SEJAHTERA (085285405808)	1 JULI 2024 Pukul. 12.13 AM	WhatsApp	Malinau	Apakah nama yayasan bisa diganti nama panti atau LKS (LKS Generasi Bersinar)?	Untuk Nama Yayasan kami berdasar pada Permohonan, Akta Notaris, AHU, NPWP. Apabila ingin dirubah namanya silahkan merubah dokumen tersebut. Untuk Akta, bisa Akta Cabang dan NPWP Cabang	Konsultasi telah selesai ditindaklanjuti via WA center Bidang Perizinan pada tanggal 2 Juli 2024, Pukul. 09.04 AM
32.	PANTI ASUHAN GENERASI BERSINAR (08125406456)	1 JULI 2024 Pukul. 18.12 PM	WhatsApp	Malinau	Mau tanya bapak / ibu kalau saya baca tanda daftar lembaga dan ijin operasional. Ijin operasional dalam hal ini apa sudah termasuk kami bisa menjalankan panti nya? Atau kami masih harus urus ijin panti lagi? Soalnya disitu tidak ada disebutkan tentang panti generasi bersinar	Benar, tidak perlu mengurus izin operasional lagi. Nanti hanya memerlukan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.	Konsultasi telah selesai ditindaklanjuti via WA center Bidang Perizinan pada tanggal 2 Juli 2024, Pukul. 09.03 AM
33.	AGUNG WALID TRI ATMAJA (085332413569)	4 JULI 2024 Pukul. 11.47 AM	WhatsApp	Tarakan	Untuk pengajuan SIKPI atas nama AGUNG WALID (SB. Bunyu Express 02) pengajuannya belum selesai-selesai dan karena hal ini pihak kami sudah ditanyain sama pihak PSDKP dan syahbandar perikanan. Sudah beberapa minggu speed kami tidak bisa jalan dan gaji karyawan jadi tertunda, mohon sekali bantuannya. Pengajuannya sebelum masa berlaku berakhir, hanya terkendala di E-BKP dan E-BKP tersebut terabit setelah masa berlaku SIKPI berakhir.	Setelah dicek di info tracking, berkas permohonan diajukan pada tanggal 25 Juni 2024 dan setelah dicek di sistem aplikasi Pesona, proses tinggal menunggu approve / verifikasi dari Kepala Dinas. Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menyampaikan ke Kepala Dinas untuk mengapprove pengajuan SIKPI tersebut di Aplikasi Pesona. Pada tanggal 5 Juli 2024, setelah dilakukan pengecekan di aplikasi Pesona, Kepala Dinas telah selesai melakukan approve pengajuan SIKPI SB.Bunyu Express 02, namun karena	Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti via WA HP center Bid. Pengaduan pada tanggal 8 Juli 2024, Pukul. 09.28 AM

						sudah sore dan sudah lewat jam kerja maka ditangani oleh bagian Back Office pada hari kerja berikutnya di Hari Senin tanggal 8 Juli 2024, dan langsung diinfokan ke Bapak Agung Walid bahwa SIKPI SB.Bunyu Express 02 sudah bisa diunduh / didownload di akun OSS milik Bapak Agung Walid.	
34.	PT.RUBY SELARAS DIPA DHARMA	1 AGUSTUS 2024	MELALUI OMBUDSMAN RI – PERWAKILAN KALTARA	BULUNGAN	Dugaan Maladministrasi penundaan berlari oleh Pemprov.Kaltara terkait tindak lanjut penyelesaian keberatan atas penerbitan izin dan rencana kegiatan PT. Ruby Selaras Dipa Dharma di atas izin usaha perkebunan PT.Sanjung Makmur	Pihak DPMPTSP Prov.Kaltara memenuhi permintaan klarifikasi dari pihak Ombudsman RI –Perwakilan Kaltara dengan melakukan pertemuan dengan pihak DPMPTSP Prov.Kaltara yang dihadiri Perwakilan Bidang Perizinan, Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan serta Bidang Dalak pada tanggal 8 Agustus 2024 bertempat di ruang konsultasi DPMPTSP Prov.Kaltara Lantai1. Dimana hasil pertemuan untuk klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bertanda tangan semua peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.	Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti secara tatap muka dengan pihak Ombudsman RI – Perwakilan Kaltara, pada tanggal 8 Agustus 2024, Pukul.09.00 AM - Selesai
35.	082211307952	12 AGUSTUS 2024 Pukul.11.30 AM	WhatsApp	Nunukan	Bertanya mengenai informasi KKPR, apakah pengajuan KKPR untuk tambak itu dari OSS atau manual? Posisi di Pulau Itai, Kabupaten Nunukan, Ukuran tambaknya 2000 Ha	Pengajuan KKPR untuk Tambak melalui OSS, biasanya terikat dengan perizinan berusaha, kalau tambak air payau KBLI 0325, disesuaikan lagi dengan jenis budidaya. Kalau untuk KKPR tidak perlu, karena merupakan di perairan darat.	Konsultasi telah ditindaklanjuti via WA HP center Bidang Perizinan pada tanggal 12 - 13 Agustus 2024, Pukul 11.46 AM – 15.17 PM

36.	PURNAWARMAN, PT. USAHA PAGUN DAMO (081367052109)	02 SEPTEMBER 2024 Pukul.18.47 PM	WhatsApp	BUNYU, KAB.BULUNGAN	Sampai saat ini pihak DPMPTSP Prov.Kaltara belum mengeluarkan Ijin Perusahaan bongkar muat PT. Usaha Pagun Damo (Sektor Perhubungan Penanganan Kargo, Bongkar Muat Barang), prosesnya terlalu sulit dan panjang	Setelah dilakukan tracking berkas posisi berkas PT. Usaha Pagun Damo masuk tanggal 23 Agustus 2024 dan sekarang posisi masih menunggu approve Kepala Dinas di Aplikasi Pesona. Karena sudah lewat 5 (lima) hari kerja, maka sesuai Standar Pelayanan akan kami teruskan ke atasan untuk ditindaklanjuti. Dan setelah disampaikan ke Kabid Kajian Kebijakan dan Pengaduan pada tanggal 03 September 2024 Pukul.09.35 AM, maka langsung diteruskan ke Kepala Dinas untuk segera mengapprove proses pengajuan Ijin PT. Usaha Pagun Damo. Lalu setelah dilakukan pengecekan kembali di Aplikasi Pesona, pengajuan ijin PT.Usaha Pagun Damo sudah selesai di approve Kepala DPMPTSP Prov.Kaltara pada tanggal 03 September 2024, Pukul.10.55 AM	Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti via WA HP Center Bid. Pengaduan pada tanggal 03 September 2024, Pukul.11.08 AM
37.	PT. BORNEO MEMBANGUN (081258066054)	24 SEPTEMBER 2024 Pukul. 08.11 AM	WhatsApp	TARAKAN	Mohon informasi permohonan IUJP atas nama PT. Borneo Membangun ada kendala apa sudah 1 (satu) bulan lebih belum terbit izinnya?	Setelah dilakukan pengecekan ke bagian Back Office, permohonan IUJP atas nama PT.Borneo Membangun sampai saat ini belum ada arahan atasan untuk diproses. Karena sudah masuk ranah pengaduan, petugas bagian pusat informasi dan pengaduan DPMPTSP Prov.Kaltara lalu melaporkan atau menyampaikan pengaduan dari	Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti via WA Center Bidang Pengaduan Pada Tanggal 24 September 2024, Pukul 14.28 PM

					PT.Borneo Membangun ke Kepala Bidang Kajian Kebijakan Dan Pengaduan Layanan Perizinan Non Perizinan untuk menindaklanjuti. Setelah menerima Informasi Pengaduan, Kepala Bidang menyampaikan langsung ke Kepala Dinas untuk dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Proses permohonan IUJP PT.Borneo Membangun diselesaikan pada pukul 14.27 PM pada tanggal 24 September 2024 oleh petugas Back Office setelah mendapat arahan langsung dari Kepala Dinas.	
38.	CAROLINE (081296333389)	3 OKTOBER 2024 Pukul.16.05 PM	WhatsApp	SUMATRA (CAB.TARAKAN)	Mau konsultasi terkait izin usaha untuk bikin badan usaha terkait ekspor di Tarakan, tapi untuk alamatnya menggunakan alamat di Sumatra, bisa atau tidak? Saya sempat ke notaris juga, dan dari notaris katanya ga ada masalah untuk akta pendiriannya walau alamat di sumatra, tapi untuk izin usahanya kira-kira gimana ya, apakah tetap bisa? Konsultasi dijawab oleh bagian Back Office Bidang Perizinan: Sebenarnya tidak ada masalah, akan tetapi nanti menyesuaikan lagi dengan persyaratan ataupun ketentuan pada sistem OSS dan biasanya sesuai aturan kita di Kaltara harus membuat NPWP Kaltara. Maka di buat saja dulu badan usahanya, nanti membuat cabang badan usaha ke notaris baru pengajuan izin ke oss, nanti bisa dibantu notaris juga, kalau mengalami kesulitan saat pengajuan nanti bisa kami bantu juga. Nanti di OSS juga akan diarahkan untuk membuat badan usaha cabang, akan tetapi tergantung lagi badan usaha ini bergerak di bidang	Konsultasi telah selesai ditindaklanjuti pada tanggal 3-8 Oktober 2024 via WhatsApp HP Center Bidang Perizinan, Pukul. 07.07 AM

						perdagangan atau apa. Di sistem OSS bahasanya kantor cabang administrasi.	
39.	PT.DAMADU CAHAYA MANDIRI (SALAMET, DIREKTUR)	14 OKTOBER 2024	SURAT MASUK Nomor: 022 / DMD / X / 2024	BULUNGAN	Permohonan Fasilitas Musyawarah PT.Damadu Cahaya Mandiri dan PT. MOA Maju Kurnia Utama (Konsesi) dengan permasalahan tumpang tindih lahan batu bara milik PT.MOA dan galian C di atas lahan seluas 60 Ha milik PT.Damadu Cahaya Mandiri di Desa Binai.	Surat Masuk diterima DPMPSTSP Prov.Kaltara pada tanggal 15 Oktober 2024, kemudian mendapat arahan disposisi Kepala Dinas ke Bidang Dalak juga ke Bidang Kajian Kebijakan Dan Pengaduan untuk memproses / menindaklanjuti surat. Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, Pukul.10.00 AM di Ruang Rapat DPMPSTSP Prov.Kaltara lantai 1, Bidang Dalak memfasilitasi pertemuan / rapat identifikasi permasalahan tumpang tindih lahan PT. MOA Maju Kurnia Utama dengan PT. Damadu Cahaya Mandiri yang juga dihadiri oleh OPD Teknis (Dinas ESDM) dengan kesimpulan akan dilakukan pertemuan lanjutan oleh PT. Damadu Cahaya Mandiri, PT. Moa Maju Kurnia Bersama dan Tim Verifikator pembebasan lahan termasuk (Camat dan Kades) di Desa Sajau Hilir untuk membahas terkait kepemilikan lahan dan perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) serta lainnya.	Permasalahan telah ditindaklanjuti pada tanggal 16 Oktober 2024, Pukul. 10.00 AM – 12.00 AM

40.	Marketing Legal Hesti / Septi Dwi (PT.Lestari Megah Sakti, 085216750634 / 08118017102)	19 Oktober 2024 / 21- 22 Oktober 2024 Pukul. 10.15 AM / 16.13 PM	WhatsApp	TARAKAN	Izin IUJPTL belum juga terbit (sudah lama di OSS), mohon segera diterbitkan, karena untuk persyaratan sudah terverifikasi per tanggal 7 Oktober 2024 tapi sampai sekarang belum juga terbit. Mohon Info dan Konfirmasinya.	Setelah menerima pengaduan dari PT.Lestari Megah Sakti, petugas pengaduan melakukan informasi tracking ke bagian back office bidang perizinan dimana informasi sementara yang kami dapat, Izin IUJPTL PT.Lestari Megah Sakti sampai tanggal 21 Oktober 2024 masih dalam proses (menunggu approved Kepala Dinas). Setelah mendapat informasi tersebut, petugas pengaduan menyampaikan ke Kepala Bidang Penanganan Pengaduan untuk menindaklanjuti dengan mengkonfirmasi langsung ke Kepala Dinas tentang hal tersebut agar bisa menyelesaikan proses approved izin IUJPTL PT. Lestari Megah Sakti.	Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti dan selesai pada tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 07.34 AM, dengan durasi pengerjaan proses izin 1 Minggu, 2 Hari, 22 Jam, 51 Menit. Setelah selesai, pihak DPMPSTSP Prov.Kaltara menginfokan ke pihak PT. Lestari Megah Sakti melalui WhatsApp, dan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi dalam proses pengurusan izin.
41.	Semion, PT. Abdi Borneo Plantations (082353485710)	22 Oktober 2024 Pukul.10.14 AM	WhatsApp	BULUNGAN	Izin menanyakan terkait 2 permohonan izin pengusahaan sumber daya air yang kami ajukan melalui sistem OSS, mengingat Pertek sudah dikeluarkan dan diverifikasi oleh Dinas Teknis (Dinas PU Bidang Sumber Daya Air) sejak tanggal 11 Oktober 2024 dan hingga hari	Pengaduan segera ditindaklanjuti oleh Bagian Back Office dengan melakukan Tracking berkas, dimana proses menerima dan memeriksa berkas pada tanggal 11 Oktober 2024 (Hari Jumat) oleh petugas Front Office, kemudian Entri data dan evaluasi berkas (pertimbangan teknis) lalu diserahkan ke Bagian Pelayanan (Back Office)	Pengaduan telah selesai ditindaklanjuti Pada Tanggal 28 Oktober 2024 Pukul. 07.40 AM dengan durasi pengerjaan 2 Minggu, 2 Hari, 16

					ini tanggal 22 Oktober 2024 belum ditindak lanjuti oleh DPMPSTSP Prov.Kaltara, maka dari itu kami mohon perizinan atas permohonan kami segera diproses karena kami membutuhkannya untuk melengkapi Dokumen sebelum diadakan Audit ISPO yg dimulai tanggal 28 Oktober 2024, Jika ada data kekurangan dari permohonan kami, mohon di konfirmasi, supaya kami bisa segera melengkapinya, Terima kasih.	pada tanggal 14 Oktober 2024 (Hari Senin) untuk di proses. Namun sampai tanggal 22 Oktober 2024 permohonan izin PT. Abdi Borneo Plantations, statusnya masih dalam proses karena menunggu arahan dari atasan. Setelah di follow up ke atasan, proses izin pengusahaan sumber daya air PT. Abdi Borneo Plantations bisa diproses dan selesai pada tanggal 28 Oktober 2028 dan tanggal 29 Oktober 2024.	Jam, 21 Menit dan pada tanggal 29 Oktober 2024 Pukul. 06.45 AM dengan durasi pengerjaan 2 Minggu, 3 Hari, 17 Jam, 20 Menit. Setelah selesai, pihak DPMPSTSP Prov.Kaltara menginfokan ke pihak PT. Abdi Borneo Plantations melalui WhatsApp, dan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi dalam proses pengurusan izin.
42.	Bapak Budi, Koperasi Jaya Aneka Karya Tambang Benuanta Bulungan (081251294292)	28 Oktober 2024 Pukul. 11.20 AM	Formulir Pengaduan Pelayanan Publik	Bulungan	Permohonan melalui Aplikasi OSS hingga sampai saat ini belum selesai, permohonan diajukan awal bulan Agustus (tanggal 2 Agustus 2024)	Pemohon bertemu langsung dengan Kepala Dinas di Ruang Kepala Dinas untuk menyampaikan pengaduan secara langsung terkait permohonan yang belum selesai dari bulan Agustus 2024 sampai bulan Oktober 2024.	Pengaduan ditindaklanjuti langsung pada tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 11.20 AM – 12.30 PM. Permohonan Koperasi Jaya Aneka Karya Tambang Benuanta

							Bulungan selesai ditindaklanjuti di aplikasi OSS oleh bagian back office bidang perizinan pada tanggal 29 Oktober 2024.
43.	DEWI (085245994783)	29 Oktober 2024 Pukul.15.46 PM	WhatsApp		Konsultasi tentang apa saja syarat izin galian batu (batu gunung & sirtu)	Permohonan melalui oss.go.id dengan pemilihan KBLI 08109, nanti persyaratannya ada tertera disitu	Konsultasi telah selesai ditindaklanjuti oleh bagian Back Office Via WA HP center Bidang Perizinan pada tanggal 30 Oktober 2024, Pukul. 07.17 - 07.57 AM
44.	SAINI, PT. Berkah Benuanta Kontruksi (082357829497)	11 November 2024 Pukul. 11.26 AM	WhatsApp	Bulungan	IUP Penjualan PT. Berkah Benuanta Kontruksi yang diajukan tanggal 22 Agustus 2024 belum ada infonya sampai sekarang, kami butuh IUP nya untuk pengurusan tersus secepatnya, mohon bantuannya	Setelah dilakukan tracking ke bagian Back Office Bidang Perizinan, pengajuan IUP dari PT.Berkah Benuanta Kontruksi belum mendapat arahan dari Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti oleh bidang perizinan (melalui OSS) jadi sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh bagian back office. Petugas Bagian Pengaduan menyampaikan hal tersebut ke Kepala Bidang Kajian Kebijakan Dan Pengaduan Layanan Perizinan Dan Non Perizinan untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan hal tersebut ke Kepala Dinas agar dapat segera ditindaklanjuti pengaduan tersebut.	Pengaduan telah ditanggapi pada tanggal 12 November 2024, Pukul. 07.58 AM – 08.06 AM via WA HP Center Bagian Pengaduan Pada tanggal 14 November sudah diproses oleh bagian Back Office Bidang Perizinan, namun masih menunggu approve Kadis di Aplikasi PESONA Dan Pada tanggal

							29 November 2024, Pukul. 10.15 AM IUP Penjualan PT.Berkah Benuanta Kontruksi selesai di approve Kadis di aplikasi PESONA.
45.	DIBYO, CV.JOUVENIL AGRO LESTARI (081346514100)	28 November 2024 Pukul. 17.44 PM	WhatsApp	Nunukan	Saya pelaku usaha CV. JOUVENIL AGRO LESTARI dari Nunukan, sedang mengurus IUP kode KBLI 01270 untuk penangkar kopi dan kakao, kami sudah memenuhi persyaratan bahkan pertek dari dinas pertanian provinsi namun sampai sekarang belum terbit sertifikat standarnya.	Setelah dilakukan tracking ke bagian Back Office Bidang Perizinan, pengajuan IUP CV.Jouvenil Agro Lestari diterima tanggal 26 November 2024, namun sampai tanggal 29 November 2024 masih menunggu appove dari Kepala Dinas di Aplikasi Pesona. Petugas Bagian Pengaduan menyampaikan hal tersebut ke Kepala Bidang Kajian Kebijakan Dan Pengaduan Layanan Perizinan Dan Non Perizinan untuk menindaklanjuti dengan menyampaikan hal tersebut ke Kepala Dinas agar dapat segera ditindaklanjuti pengaduan tersebut. Dan setelah dilakukan konfirmasi, Kepala Dinas segera mengapprove IUP Bapak Dibyo di aplikasi Pesona, kemudian bagian back office menindaklanjuti proses izin tersebut sampai selesai.	Pengaduan telah ditindaklanjuti via WA tanggal 29 November 2024, Pukul. 09.32 AM, Lalu diteruskan Kepala Bidang ke Kadis untuk ditindaklanjuti. Pada pukul 10.15 AM IUP Kode KBLI 01270 Bapak Dibyo sudah selesai di approve Kadis di aplikasi Pesona. Bagian Back Office kemudian memproses lebih lanjut IUP tersebut sampai selesai.

46.	Zafran Kamal, PT.Kalimantan Prima Persada Jobsite Malinau (082382932085)	5 Desember 2024 Pukul. 09.45 AM	WhatsApp	Malinau	Untuk pengajuan IUPTLS sudah kami ajukan dari bulan Oktober akhir, namun belum ada update di OSS, apakah bisa dibantu untuk approve pengajuan kami?	Setelah dilakukan tracking ke bagian Back Office Bidang Perizinan, pengajuan IUPTLS PT.Kalimantan Prima Persada Jobsite Malinau diterima tanggal 25 Oktober 2024, namun sampai bulan Desember 2024 masih menunggu approve / persetujuan dari Kepala Dinas di Aplikasi Pesona. Petugas Bagian Pengaduan menyampaikan hal tersebut ke Kepala Bidang Kajian Kebijakan Dan Pengaduan Layanan Perizinan Dan Non Perizinan untuk menyampaikan hal tersebut ke Kepala Dinas agar dapat segera ditindaklanjuti pengaduan tersebut.	Pengaduan telah ditindaklanjuti via WA HP center Pengaduan tanggal 5-6 Desember 2024, Pukul. 16.38 PM Dan pada tanggal 11 Desember 2024 pengajuan IUPTLS PT.Kalimantan Prima Persada Jobsite Malinau sudah selesai di approve Kepala Dinas di aplikasi Pesona.
47.	BAYU, PT.Samudera Citrabara Maritim (082225577890)	9 Desember 2024 Pukul. 15.25 PM	WhatsApp	Bulungan	PT. Samudera Citrabara Maritim dengan nomor kegiatan usaha 52240 – Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) dan NIB. 21062301083690001 mengajukan persetujuan perizinan berusaha (OSS) Sektor Perhubungan pada tanggal 26 November 2024, namun sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 proses izin belum selesai padahal info dari Dishub Provinsi (OPD Teknis) kelengkapan syarat sudah selesai dan tahap selanjutnya ke DPMPTSP Prov.Kaltara.	Pihak PT. Samudera Citrabara Maritim awalnya menghubungi Help Desk OSS DPMPTSP Prov.Kaltara di tanggal 28 November 2024 melalui WhatsApp. Setelah menerima pengaduan, help desk OSS membantu mencari informasi ke bagian back office bidang perizinan dan setelah dilakukan pengecekan status dari Dishub Provinsi persyaratan sudah terverifikasi dan status masih dalam proses di DPMPTSP Prov.kaltara (menunggu approve Kadis di Aplikasi Pesona). Karena sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 status masih dalam proses (menunggu approve Kadis di	Pengaduan telah ditindaklanjuti via HP center Bidang Pengaduan tanggal 9 Desember 2024, Pukul. 15.31 PM Dan pada tanggal 11 Desember 2024 pengajuan persetujuan perizinan berusaha (OSS) Sektor Perhubungan PT. Samudera Citrabara Maritim

						Aplikasi Pesona), Help desk OSS meneruskan pengaduan ke petugas pengaduan untuk ditindaklanjuti. Petugas Bagian Pengaduan menyampaikan hal tersebut ke Kepala Bidang Kajian Kebijakan Dan Pengaduan Layanan Perizinan Dan Non Perizinan untuk menyampaikan hal tersebut ke Kepala Dinas agar dapat segera ditindaklanjuti pengaduan tersebut.	sudah selesai di Approve Kepala Dinas di Aplikasi Pesona dengan total pengerjaan 2 Minggu 2 Hari 7 Jam 48 Menit.
--	--	--	--	--	--	--	---

Mengetahui
KEPALA BIDANG,



Radiah BT Yolohio, S.H, M.AP
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19731002 200604 2 012



Jupri



9 Januari 2024

Ass 14.33

⇒ Diteruskan

untuk KBLI 50133 harus ada yang ke
Perijinan Kabupaten Kota Pak Hery

14.34

bidang Angkutan laut...apa
persyaratannya

..

14.34

maksudnya izin pengangkutan ikan
kah pak?

14.47 ✓✓

angkutan barang 14.48

kbli 50133 14.48

info ptsp tarakan .wewenang propinsi

14.49

barang apa yg mau diangkut pak?

14.49 ✓✓

⊘ Pesan ini dihapus 14.50

baik pak, tapi barang khusus yg mau
diangkut itu ikan atau bbm, atau apa
bapak?

14.56 ✓✓

bbm..barang.perdagangan...mesin

14.57

kalau untuk persyaratannya langsung
bisa d akses di oss.go.id ya bapak,
silakan disesuaikan lagi untuk
pemilihan KBLI nya

15.05 ✓✓

⇒ Diteruskan

KBLI 2020 50133

Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
Barang Khusus



**PEMERINTAH DESA LIUK BULU
KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI
KABUPATEN NUNUKAN**

Nomor : 140/75/DS-LB-KSA/XI/2023
Lampiran : 1 (Satu) Expl
Perihal : *Permohonan Pelepasan Tanah*

Kepada
Yth. BUPATI NUNUKAN
Cq. Kepala DPMD Kab.
Nunukan
Di-
Nunukan.

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil koordinasi kami ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara terkait Penggunaan Kawasan Hutan untuk areal Rencana Relokasi Permukiman Desa Liuk Bulu dengan luas $\pm 2,7$ Hektar yang terletak di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan .

Kami selaku Pemerintah dan Masyarakat Desa Liuk Bulu Kecamatan Sembakung Atulai, dengan ini memohon dengan hormat kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan kiranya dapat menindaklanjuti usulan kami untuk diajukan Surat Pelepasan (Legalitas Tanah) dari pemilik area Konsensi yaitu PT.Adindo Hutani Lestari kepada Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Utara agar Pembangunan Pemerintah dapat masuk di wilayah Desa Liuk Bulu.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

1. Rekomendasi Camat;
2. Proposal;
3. Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat area bersama pihak Perusahaan;
4. Surat Hibah Lahan;
5. Dokumentasi Lahan.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Liuk Bulu, 21 Nopember 2023



Kepala Desa Liuk Bulu ,

ACONG

Sekretaris/Notulis,

JONI



Nunukan, 23 November 2023

Kepada

Yth. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

di,-

Tanjung Selor

BUPATI NUNUKAN

Hj. ASMIN LAURA HAFID, S

Hj. ASMIN LAURA HAFID, SE, MM, Ph.D

PUSAT INFORMASI DAN PENGADUAN





18 Januari 2024

🔒 Pesan dan panggilan dienkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.



+62 822-5475-6055

~ ayuindriyani

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

 **Fitur keamanan** **Blokir** **Tambah**

Selamat siang 🙏

Izin bertanya pak/bu, untuk membuat surat izin usaha di PTSP, apa saja saratnya pak/bu?

14.11

Siang bu, izin usaha apa ibu? 14.12 ✓✓

Jualan kue kering pak/bu 🙏

14.13

Pengajuannya melalui OSS ya Bu

14.56 ✓✓

Online 14.56 ✓✓

19 Januari 2024



Selamat siang bu, untuk KBLI yg dipilih mungkin bisa menggunakan KBLI di atas bu, silakan diakses melalui oss.go.id ibu

14.32 ✓✓

Terimakasih 🙏

14.38



Ketik pesan



12:40

Pht Pak Safari Pe...

25 Januari 2024

Selamat pagi 10:55

Ijin bertanya untuk perpanjangan ijin pengambilan air bawah tanah 10:58

silakan bapak, via chat saja ya bapak. terima kasih 11:12 ✓✓

Baik...terimakasih 11:20

Persyaratannya atau form perpanjangan apakah bisa d share? 11:21

untuk persyaratan bs langsung di akses di laman [oss.go.id](#) bapak, masuk di PB-UMKU, pengajuannya pun juga melalui oss ya bapak 🙏 11:22 ✓✓

Oo.baik terimakasih 🙏 11:24

Pilihan ijinnya apa y 11:27

Mohon arahnya 11:34

 11:43

Apakah pilihannya ini? 11:43

Karena tidak ada pilihan ijin pengambilan air tanah 11:48

itulah pak yang perusahaan air tanah bapak, tapi krna lokasi bapak ada di tarakan menjadi kewenangan pusat skrg pak, untuk kwenangan provinsi aja yg masuk wilayah sungai di Bulungan saja(kayan). 14:12 ✓✓

Bukan kewenangan kabupaten kota y 14:15

Sepertinya persyaratannya untuk perijinan baru 14:20

lokasi pengambilannya dimana bapak? 14:25 ✓✓

Lokasinya RS Pertamina Tarakan 14:26

Pht Pak Safari Pertamina

Lokasinya RS Pertamina Tarakan

masuk kewenangan pusat skrg pak, 14:28 ✓✓

Pht Pak Safari Pertamina

Sepertinya persyaratannya untuk perijinan baru

ini bisa bapak akses dari akun oss bapak ya, masuk dulu ke pb-umku baru perpanjangan 14:28 ✓✓

Baik terimakasih..tadi saya masuk di permohonan baru 14:34

langsung perpanjangan aja bapak, krna sdh ada izin sebelumnya 14:35 ✓✓

Mohon maaf data administrasi permohonan ijin perusahaan air tanah perpanjang ga bisa download templatenya 14:58

Ada kah template yg bisa kami dapatkan? 14:58

 14:58

Panggilan Suara Tak Terjawab

Ketuk untuk menelepon balik 11:30

mohon maaf bapak, kalau untuk itu kami pemprov kurang mengerti krna bukan kewenangan kami, mungkin bs lgsg hubungi call center untuk KemenESDM terkait permasalahan tsb bapak. 🙏 15:57 ✓✓

Baik terimakasih 🙏 15:58

Ketik pesan



+62 895-0750-4805

~ Dennis Fernando Leonardi

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

 **Fitur keamanan**

 **Blokir**

 **Tambah**

Selamat siang, sebelumnya perkenalkan saya Dennis Fernando Leonardi. Saya memiliki pertanyaan sehubungan dengan penggalian atas tanah HGB.

Terima kasih 🙏

Diedit 12.48

+62 895-0750-4805

Selamat siang, sebelumnya perkenalkan saya Dennis Fernando Leonardi. Saya memiliki pertanyaan sehubungan dengan penggalian...

Selamat siang
apakah pertanyaan bersifat pengaduan dalam proses pelayanan yang diberikan?



14.22 ✓✓

Pertanyaan bersifat permohonan informasi

14.23



 Ketik pesan



+62 895-0750-4805

Pertanyaan bersifat permohonan informasi

apa terkait OSS?

14.26 

Terkait hal berikut.

Dalam hal suatu perusahaan memiliki HGB atas suatu bidang tanah, saya memahami bahwa hak atas tanah tersebut haknya memberikan kepemilikan atas tanah dan seluruh bangunan yang dibangun diatasnya. Namun, dalam hal akan dilakukan penggalian atas tanah tersebut untuk pembangunan bendungan maka hasil dari galian tersebut merupakan milik negara. Berdasarkan hal tersebut pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah (i) apakah kegiatan penggalian dan penggunaan batu-batuan diatas area HGB tersebut dapat dilakukan mengingat kegiatan ini bukan kegiatan komersil? dan (ii) apakah terdapat ketentuan dari Kemenkeu mengenai kompensasi pemanfaatan material tanah dan batu dalam rangka non komersial baik pembayaran dilakukan kepada negara atau pemerintah... [Baca selengkapnya](#)

14.31

+62 895-0750-4805

Terkait hal berikut.

Dalam hal suatu perusahaan memiliki HGB .

 Ketik pesan





+62 895-0750-4805



+62 895-0750-4805

Terkait hal berikut.

Dalam hal suatu perusahaan memiliki HGB ...

Posisi bapak apa ada di Tanjung Selor?

Jika iya, silahkan datang berkonsultasi langsung dengan staf Fronf Office di kantor kami, untuk mendapat penjelasan secara detail 🙏

14.43 ✓✓

Untuk lokasi sendiri spesifiknya hanya di kalimantan.

14.43

Apakah sekiranya tdk bisa bantuannya pak/bu untuk berkonsultasi via WA saya di jakarta 🙏

14.44

Atau mungkin terdapat nomor yang bisa saya hubungi untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat

14.44

⇒ Diteruskan

(i) boleh,dng catatan tdk utk komersil dan diatas lahan milik sendiri (ii) tidak ada,krn tdk ada unsur komersialisasi didalamx *tp alangkah lebih baikx tim teknis dr dinas terkait melakukan peninjauan ke lapangan utk memastikan kondisi kasus yg disebutkan

15.05 ✓✓

berikut jawaban dari tim teknis terkait, terima kasih 🙏

15.05 ✓✓



Ketik pesan





+62 895-0750-4805



peninjauan ke lapangan utk memastikan kondisi kasus yg disebutkan

15.05 ✓✓

berikut jawaban dari tim teknis terkait, terima kasih 🙏

15.05 ✓✓

Baik apabila dilakukan untuk komersil? Bagaimana ya bapak/ibu?

15.14

Hal ini dikarenakan bendungan yang dibuat tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan PLTA

15.18

harus mengurus izin dulu bapak jika sifatnya komersil

15.25 ✓✓

Izin yang dimaksud dalam hal ini apakah ada namanya pak

15.26

silahkan berkonsultasi terkait perizinan di call center bidang perizinan

berhubung jam kerja sdh mau habis, disarankan utk berkonsultasi kembali dg bidang perizinan besok pagi ya pak 🙏

15.41 ✓✓

**Bidang Perizinan**

15.42 ✓✓

Kirim pesan

Baik terima kasih

15.43



Ketik pesan



6 Februari 2024

Pesan dan panggilan dienkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.



+62 812-5413-1969

— Mughny

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

Fitur keamanan

Blokir

Tambah

+62 812-5413-1969 menggunakan timer default untuk pesan sementara di chat baru. Pesan baru akan hilang dari chat ini 90 hari setelah dikirim, kecuali disimpan. Ketuk untuk menyetel timer default Anda sendiri.

Selamat Pagi, Bapak/Ibu.
Perkenalkan nama saya Mughny Apriandi Rachim dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Saya ingin bertanya terkait kontak yang bisa dihubungi untuk masalah Surat Keterangan Penelitian saya harus hubungi di mana ya pak/bu ?
Terimakasih sebelumnya

10.11

Selamat Pagi
Mau penelitian untuk Tugas akhir?

10.11 ✓✓

Iya

10.11

Lokasi penelitian saya tepatnya di Bulungan

10.12

Kalau untuk tugas akhir mahasiswa kami tidak mengeluarkan bu, kecuali penelitian dari Swasta

10.13 ✓✓

Untuk Surat Keterangan Penelitian di keluarkan oleh DPMPSTSP Bulungan ya kak ?

10.14

Karena kemarin saya sudah menghubungi Kasbang Pol Bulungan jawaban nya juga tidak mengeluarkan surat rekomendasi penelitian tapi langsung diarahkan ke instansi tempat meneliti

10.16

Kalau Untuk Tugas akhir mahasiswa Prov dan Kab tidak mengeluarkan Rekomendasi .

10.16 ✓✓

+62 812-5413-1969

Karena kemarin saya sudah menghubungi Kasbang Pol Bulungan jawaban nya juga tidak mengeluarkan surat rekomendasi ...

betul, langsung ke isintansinya saja yaa

10.16 ✓✓

Karena ini instansi swasta yang ingin saya teliti maka langsung kesana ya kak ?

10.17

sebelumnya mohon maaf kak apabila mengganggu, apakah saya bisa meminta kontak DPMPSTSP Bulungan karena nomor hotline nya yang di webiste tidak bisa dihubungi 🙏

10.21

Jadi, kami hanya mengeluarkan Rekomendasi Surat penelitian kepada pihak swasta yang ingin mengajukan penelitian di Kaltara. Mahasiswa yang ingin meneliti di Kaltara untuk kepentingan Tugas akhir kami tidak mengeluarkan rekomendasi, baik lokasi penelitiannya i instansi pemerintah maupun swasta kalau mahasiswa tidak perlu ya

10.21 ✓✓

+62 812-5413-1969

sebelumnya mohon maaf kak apabila mengganggu, apakah saya bisa meminta kontak DPMPSTSP Bulungan karena nom...

bisa buka di website mereka yaaa

10.21 ✓✓

Baik terima kasih kak sebelumnya

10.22



+62 853-9833-1373

~ lcha

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

 **Fitur keamanan**

 **Blokir**

 **Tambah**

7 Februari 2024

Assalamualaikum
Selamat pagi, kak mau tanya kalau mau buat perizinan apotek alurnya perizinan bagaimna yah? Mohon arahannya

10.12

Selamat Pagi
pengajuannnya melalui OSS ya bu (online)

11.26 ✓✓

jika mengalami kendala, bisa langsung ke PTSP Kabupaten bisa juga bu, karena kewenangan Kabupaten

11.27 ✓✓



Panggilan Suara Tak Terjawab

Ketuk untuk menelepon balik

10.08



Ketik pesan



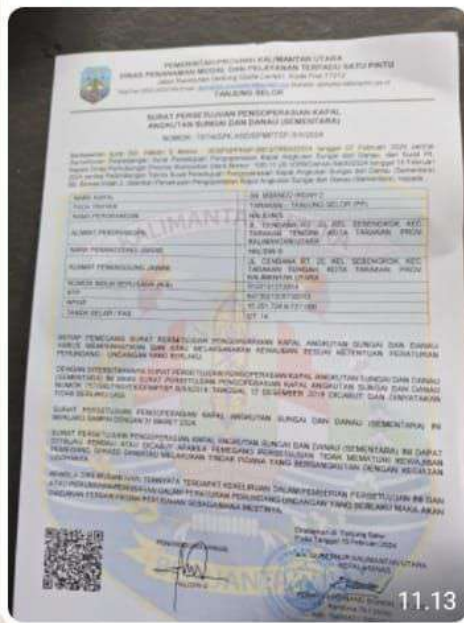


+62 812-1112-66...



19 Februari 2024

Diteruskan



Mba knpa tanggal berlaku y gk rubah
dn tetap di ksh keluar gimana tu
mba buat kedepan y, minta tolong di
koreksi tanggal berlaku y

11.13



11.13



Panggilan Suara Tak Terjawab

Ketuk untuk menelepon balik

11.15

Diteruskan

Untuk yg borneo indah saya
salah tanggal mas, harusnya 31
maret 2024 mengikuti sertifikat
keselamatan

12.13 ✓✓

Diteruskan

memang segitulah d sertifikat
keselamatan nya

12.13 ✓✓

Diteruskan

msh sementara

12.13 ✓✓



Ketik pesan



19 Februari 2024

Selamat siang bu... mau tanya perusahaan jpt apa bisa tambah kbli lagi?

13.59

JPT dalam hal ini Jasa Pengurusan Transportasi kah bapak?

14.30 ✓✓

Iya bu..

14.30

tidak bisa bapak, JPT masuk single purpose

14.32 ✓✓

Ok baik.. terimakasih infonya 🙏

14.33

sama2 bapak 🙏

14.42 ✓✓

23 Februari 2024

Selamat siang bu...

13.07

siang bu..

14.25 ✓✓

Mau tanya...

14.26

Untuk PT baru buat ijin usaha 49432 kbli ini syaratnya apa aja ya bu?

14.27

kalau boleh tahu mau angkut apa ya bu?

15.20 ✓✓

silakan di cek di oss ya bu, tersedia disitu ya bu..

15.22 ✓✓

Ohhh PT nya baru mau di bikin bu...

15.24

baik bu

15.25 ✓✓

Terimakasih 🙏

15.27

⇒ Diteruskan

Angkut iso tank isi LNG

15.29

Ini angkutannya bu

15.29

baik bu, dilengkapi aja bu persyaratannya, krna kebetulan merupakan kewenangan pemerintah pusat bu untuk KBLI tsb

16.03 ✓✓

Baik bu... terimakasih banyak 🙏

17.38



+62 823-2860-22...



+62 823-2860-2237

~ Fachry_Aie

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

Fitur keamanan **Blokir** **Tambah**

29 Februari 2024

Selamat malam 19.44

Saya mau konsultasi masa perizinan generator set 250 kva
Diedit 19.44

1 Maret 2024

Selamat pagi bapak, untuk perizinan IO 250 kVa hanya dalam bentuk laporan saja pak yg disampaikan ke dinas ESDM Prov.Kaltara. terima kasih 🙏

08.24 ✓✓

**Isro ESDM**

08.32 ✓✓

Kirim pesan

silakan korrdinasi dengan beliau ya pak terkait format dan prosedurnya.

08.32 ✓✓



Ketik pesan



8 Maret 2024

Selamat siang mba, perkenalkan saya jurda admin dari CV. Beringin Satu Perkasa. Mba ini tadi saya ada ke MPP yang ditarakan menanyakan terkait status verifikasi dari kelengkapan pemenuhan syarat untuk izin berusaha KBLI 49431-angkutan bermotor untuk barang umum. Ini kan saya udah upload berkasnya dari bulan 11 2023 mba. Di oss saya cek sampai sekarang status nya masih belum terverifikasi. Apakah bisa dibantu mba untuk perizinan tersebut proses nya sudah sampai mana ya? Karna kalau misalnya memang ada yang salah dari berkas saya upload, saya bisa tau mba berkas mana saja yang salah. NIB Perusahaan saya itu [1254000330498](#) CV. Beringin Satu Perkasa

Diedit 13,34

Mohon bantuannya mba, terima kasih sebelumnya 🙏

13.35

+62 821-1287-3727

Selamat siang mba, perkenalkan saya jurda admin dari CV. Beringin Satu Perkasa. Mba ini tadi saya ada ke MPP y...

selamat siang Ibu, mohon maaf untuk permohonan tsb blm masuk ke sistem kami, kemungkinan masih di posisi dinas teknis dalam hal ini dishub prov, terima kasih

14.30 ✓✓

apa ada kontak yang bisa saya hubungi kak untuk menanyakan status tersebut?

14.30

baik, cb kami confirm ke dishub dulu ya bu

14.31 ✓✓

siap mba, ditunggu

14.32

**Ihang Dishub**

14.54 ✓✓

Kirim pesan

ini ya bu

14.54 ✓✓

Baik terima kasih mba

14.56

 Ketik pesan

+62 852-4731-5788

Beli

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

Foto keamenan

Buka

Tambah

Siang admin, sy mau mendaftar izin galan c, mohon dipandu utk pengisian data usahanya min, utk pilihan bidang usahanya pilih yg mana ya?

untuk komoditas apa bapak?

Anda
untuk komoditas apa bapak?
ini sy milih penggalan batu, pasir dan tanah liat lainnya (08109)

maksud kami bapak, untuk yg digali di lapangan ini apa pak?

Anda
maksud kami bapak, untuk yg digali di lapangan ini apa pak?
terasa timbunan dan batu

Beda komoditas itu pak, sebestar kami cek KSLUnya ya pak

Anda
beda komoditas itu pak, sebestar kami cek KSLUnya ya pak
Ok

08105 pak,

Ruang lingkup kegiatannya apa ya?

IPB perseorangan?

Utk daftar produk/jasa nya gmn ya? Diler apa?

Panggilan Suara Tak Terjawab
Kerusak untuk menelepon balik

Panggilan Suara Tak Terjawab
Kerusak untuk menelepon balik

Panggilan Suara Tak Terjawab
Kerusak untuk menelepon balik

+62 852-4731-5788
Ruang lingkup kegiatannya apa ya?
tolong difoto ya pak pilihannya biar kami liat





Pilihannya itu

kalo pilih IUP eksplorasi berarti harus ada WIUP dulu ya pak dan kalau langsung bisa SPB untuk tanag urug, kalau bituan harus lewat WIUP ya

Klo IPII perseorangan gmn?

ini ga bisa telepon kah mbak?

Panggilan suara
3 menit

14 Maret 2024



Pagi mbak, melanjutkan yg kemarin. ini sy udh bikin perseorangan perserangannya, sertifikatnya jg udh ada. Lalu yg bertanda merah ini apakah bisa menjadi hijau? Bagaimana caranya mbak?

harus dibuat akun OSS baru ya pak dengan data sesuai sertifikatnya

ntah jd akun yg ini udh ga bisa ya?

nggak bisa pak karena itu akun perseorangan tetapi kalau mau dipake bisa aja pak untuk kegiatan lain

Kirim pesan

Anda

selamat siang bu, kami dari ptsp prov..ingin mengonfirmasi terkait perpindahan lokasi lab Naraya ya bu? ap...

Benar

15.05

Anda

jika benar apakah sudah dilakukan perubahan data usaha pada sistem OSS RBA? terima kasih 🙏

Seperti nya belum

15.06

Apa surat ijin berlaku 5 tahun ya ?
Bagaimana jika pembuat surat ijin sdh tdk bekerja lagi dinaraya?

15.06

baik bu, segera dilakukan perubahan saja bu di sistem oss ya bu 🙏

15.07 ✓✓

penanggung jawab maksud ibu?

15.07 ✓✓

Anda

baik bu, segera dilakukan perubahan saja bu di sistem oss ya bu 🙏

Keinginan ibu mencabut semua ijin.
Apa bisa ya .. karena ibu sdh tdk bekerja lagi di situ.

15.07

begitu ya bu, baik..coba besok pagi saya cari aturannya dulu ya bu..baiknya bagaimana, jadi ibu sdh tdk d Naraya ya bu?

15.08 ✓✓

Anda

penanggung jawab maksud ibu?

Iya ibu yg buat ijin dari awal hingga bisa operasi.
Trus ibu berhenti arti nya stop gaji, tapi hsl kerja ibu msh di pake sampai sekarang, apa iya mmg bgt ?

15.08

kebetulan kami sdh jam plg ibu, mhn maaf besok pagi kita lanjut lagi ya ibu..baik bu 🙏😊

15.09 ✓✓

Anda

begitu ya bu, baik..coba besok pagi saya cari aturannya dulu ya bu..baiknya bagaimana, jadi ibu sdh tdk d Naraya ya ...

Sdh tdk, bahkan semua karyawan dan dokter penanggung jawab sdh tdk di situ.

Ibu mau tau aturan nya, klo mmg bs ibu mau cabut jika msh ada terkait nama ibu 🙏😊

15.10

Karyawan mrk yg baru seperti nya tidak punya sip juga

15.11

14 Maret 2024

baik bu, kemungkinan hari ini pihak dinkes prov dan ptsp akan berkunjung ke lab.Naraya yg di jalan semangka.

09.13 ✓✓

mohon izin bu, kalau untuk pencabutan izin sepertinya agak sulit bu, krna atas nama PT, kalau perubahan bisa bu..

09.14 ✓✓

Oiya terima kasih

09.17



Wahyu Fajar SIUP



siup

09.35

Maaf sebelumnya pak, saya kurang paham dengan maksud bapak? Jadi apakah pembuatan SIUP saya bisa di proses? Atau saya harus perpanjang dulu pas besarnya baru bisa di proses pembuatan SIUP nya? Karna pihak Syabandar sdah tidak bisa perpanjang pas besar jika tidak ada SIUP

09.44

kami proses bapak, akan tetapi nnti untuk pengurusan SIPI nya kan hrus pakai pas besar yg msh berlaku, drpd nnti SIUPnya terbit pas besarnya masih mati nnti nda bisa terproses pak, makanya sy kasih info skrg agar nnti dilakukan perpanjangan pasnya..begitu bapak

09.47 ✓✓

Wahyu Fajar SIUP

Iya pak, soalnya pas besarnya tidak bisa di perpanjang kalau tidak ada siup

iya benar bapak, setelah siupnya terbit pak

09.48 ✓✓

Oh, baik pak, trimakasih infonya pak, pasti nanti saya akan perpanjang pas besarnya..

09.50

baik pak, 09.50 ✓✓



Ketik pesan



27 Maret 2024

⚠️ Pesan dan panggilan dikirim secara otomatis. Tidak akan masuk di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.



+62 812-5555-4059

- Jamaludin

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

Fitur keamanan

⛔ Blokir

+ Tambah

Assalamualaikum wrwb

Selamat Pagi

Ijin... Jamaludin Kec. Sembakung mau koordinasi & konsultasi terkait Penggunaan Kawasan Hutan utk Buka Jalan Penghubung Antar Desa di Kec. Sembakung khususnya Jalan Desa Lubakan-Tagul-Pelaju-Teplan



09.40



09.41

Ijin melengkapi kekurangan berkas yg pernah diajukan Pak Ridwan (mantan Camat Sembakung). Mohon petunjuk dan pencerahannya 🙏

09.42

+62 812-5555-4059

Foto



Ijin... Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kec. Sembakung

09.43



09.44



09.45

28 Maret 2024

Selamat Pagi Pak

09.23

untuk kelengkapan berkasnya btm lengkap pak

Pakta integritasnya btm ada pak

09.23

sebelumnya kami sudah komunikasi dengan Bapak Ridwan

09.24

+62 812-5555-4059

Foto

ini pak, poin B untuk Pakta Integritas

09.24

Selamat Siang

Ijin, utk berkas Sembakung hanya kekurangan Pakta Integritas saja ya Pak. Dan berkas yg lainnya sudah ada di DPMPSTST PROV ya Pak. Apakah ada contoh dokumen/ surat Pakta Integritas ya Pak... nanti kami bisa membuatnya. Mohon bantuannya 🙏

13.13

Kami rencananya kalau sudah lengkap mau ke kantor PMPTST Provinsi insha Allah setelah lebaran ke Tigj Selor 🙏

13.15

Sama seperti Pernyataan komitmen bapak dibuat pernyataan bermaterai dengan 7 poin diatas pak

14.03

Tidak ada format baku ya Pak. Jadi kami buatkan sesuai komitmen 7 poin tsb. Utk yg lainnya sudah aman ya Pak. Maaf km kami jauh dari Kec. Sembakung. 🙏

15.01

1 April 2024

Iya apak mengikuti yang 7 poin aja pak sama seperti pernyataan Komitmen kmrini 🙏

09.36

Siap tks atas bantuan dan informasinya 🙏

10.04

kami tunjukkan ya Bapak

← +62 812-5496-63... 📺 📞 ⋮

1 April 2024

selamat pagi pak, ijin bertanya jika saya mencabut salah satu kegiatan usaha saya di oss dan ingin mengembalikannya dikarenakan ada proses perizinan PB-UMKU yang sedang berjalan pada no KBLI/ kegiatan usaha tersebut apa bisa ya pak?

08.50

mohon petunjuknya pak 🙏

08.51

+62 812-5496-6368

selamat pagi pak, ijin bertanya jika saya mencabut salah satu kegiatan usaha saya di oss dan ingin mengembalikannya ...

izinnya apakah sudah terbit?

09.09 ✓✓

onresult pak di sistem SEHATI, saya proses terkait izin tersus

Diedit 09.09

+62 812-5496-6368

selamat pagi pak, ijin bertanya jika saya mencabut salah satu kegiatan usaha saya di oss dan ingin mengembalikannya ...

apa sudah dicabut izinnya pak? atau buat vidionya aja pak dari akun usaha bapak biar kami bisa pelajari

09.12 ✓✓

sudah dicabut pak cuma saya lupa kemarin kalau ada masih nyangkut proses di menu PB-UMKU pak keliru kemarin.

09.13

sebentar saya kirim ss nya pak

09.13

+62 812-5496-6368

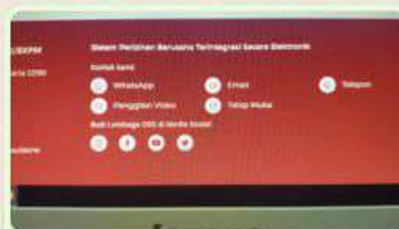
sudah dicabut pak cuma saya lupa kemarin kalau ada masih nyangkut proses di menu PB-UMKU pak keliru kemarin.

Silahkan langsung kontak tim OSS aja bapak manatau bisa diberikan solusi. kalau PTSP tudak bisa mengembalikan lagi pak

09.16 ✓✓

oh baik pak terima kasih pak

09.16



Panggilan vidio aja bapak ke mereka

09.16 ✓✓

😊 Ketik pesan



2 April 2024

Pagi bu. sy fiqui dr PT. KPP bu.
Izin bu mau tny, utk pengajuan
KBLI 09900 **Aktivitas Penunjang
Pertambangan dan penggalian
lainnya** mencakup jasa penunjang
atas dasar balas jasa atau kontrak...
apakah isiannya membutuhkan
PKKPR utk memperoleh KBLI 09900
bu ya?

09.17

kegiatan usahanya apa bapak?

09.25 ✓✓

kalau PKKPR merupakan perizinan
dasar/persyaratan dasar bapak
jadi memang harus dilakukan
pemenuhan bapak

09.25 ✓✓

Usaha Jasa Pertambangan (dalam
rangka Pengangkutan Batubara) bu.
Hsl koordinasinya dgn ESDM Kaltara
Pak Parasian, informasinya tdk perlu
PKKPR bu.

Namun sy diarahkan koordinasi
dgn PTSP Kaltara lg bu berkenaan
dgn KBLI 09900.. apakah ckup
mengajukan dlm OSS RBA stlh
dilakukan KBLI 09900 di tambahkan
dlm akta perubahan atau perlu
PKKPR terlebih dahulu bu..

Diedit 09.34

Kalau dlm akta, perlu jg perubahan bu
ya agar KBLI 09900 di tambahkan...

09.34

Fikri Kayan

Usaha Jasa Pertambangan (dalam
rangka Pengangkutan Batubara) bu. Hsl
koordinasinya dgn ESDM Kaltara **Pak Pa...**

PKKPR terbitnya dari OSS ya pak.
Jadi kalau mau ditambahkan di
aktenya silahkan bapak setelah itu
baru lakukan penambahan KBLI di
OSS

10.06 ✓✓

Siap terimakasih bu ya 🙏

10.12

 Ketik pesan



affandy



Sudah pak silakan di cek u akun bapak

15.55 ✓✓

Siap terimakasih bu 🙏

15.56

17 April 2024

Ijin tanya bu. Itu tgl expayer 30 Desember y bu. Nda sampai 1 thn berlakunya sikpi jembatan Rezky y bu

17.00

18 April 2024

pagi pak, iya benar bapak..mengikuti masa berlaku yg lama, karena terlambat mengajukan perpanjangan sikpi makanya menggunakan masa berlaku surut bapak, jadi tidak smpai satu tahun

08.22 ✓✓

untuk ke depannya kalau bisa sebelum habis masa berlaku sudah harus melakukan perpanjangan ya bapak, agar masa berlaku tetap satu tahun. terima kasih 🙏

08.23 ✓✓

Oh gitu makasih infonya bu 🙏

08.32

iya bapak, sama2

08.44 ✓✓



Ketik pesan





PT Rimba



Hari ini

Siang ...maaf mau tanya, seharusnya panjang koridor.yang kami usulkan sepanjang 13 km...disk cuma 6.km.saja

11.10

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2003 Periode II.

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : SK.139/MPH/LK/SK/ET/RS/PL/01/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Peringatan Berbasis Budaya Perayaan Tahun Baru Imlek 2022 sebagai Peringatan Nasional PT Rimbak Makmur Sentosa Nomor 41.553.1a Unsur Peta Suku Batak Liris Rukia Liris Pahlai Tiga Motif di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik dan Keputusan Nomor : SK.816/MPH/LK/SK/ET/RS/PL/01/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Peringatan Berbasis Budaya Perayaan Tahun Baru Imlek 2022 sebagai Peringatan Nasional PT Rimbak Makmur Sentosa Nomor 41.553.1a Unsur Peta Suku Batak Liris Rukia Liris Pahlai Tiga Motif di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
3. Surat Direktur Utama PT Rimbak Makmur Sentosa Nomor : 04-DIR-RMS/INT/1/2021 tanggal 1 Januari 2021 perihal Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan PT Rimbak Makmur Sentosa
4. Surat Kepala Desa Kelurahan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 500-4.3.11/136/IL/1/DIRJIT tanggal 14 Maret 2024 perihal Permohonan Tindakan dalam Rangka Penetapan Peringatan Berbasis Budaya Perayaan Tahun Baru Imlek 2022 sebagai Peringatan Nasional PT Rimbak Makmur Sentosa

MEMUTUSKAN

Menstruatum

2. Memberikan Persetujuan Penggunaan Koridor kepada :
 Nama Persetujuan : PT RIMBA MAKMUR SENTOSA
 Alamat Koridor : Menara Wijayah II, 1 dan 2, Jl. DRI 10
 Anas, Agung Ude, Agung Kuningan
 Timur Setiabudi Kota Adm. Jakarta
 Selatan DKI Jakarta

KEDUA

Persetujuan Penggunaan Koridor sebagaimana dimaksud pada Dirium KESASTU sepanjang 56.683 m (enam ribu enam ratus delapan puluh tiga meter) dengan lebar koridor 40 m (empat puluh meter) yang terdiri dari jalan utama/lintas jalan, bahu jalan kanan dan kiri, serta terbang melintasi dari tepi bahu jalan kanan kiri.

RESULTS

Mewajibkan kepada pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEATU untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

11.10
 11.10[illegible]

11.10

Selamat pagi pak. Yg 6.625 merupakan penggunaan bersama dengan PT Inhutani jadi tidak dimasukkan lagi di SK Izin perusahaan bapak. Yg dimasukkan hanya yg belum dibebani izin

11.40 ✓✓

Baik terima kasih infonya

11.53



Ketik pesan





+62 813-4509-1709



2/5/2024

Selamat pagi, saya ingin konsultasi terkait persyaratan perubahan pemegang saham, apakah pemenuhan persyaratan ini bisa dikirim melalui via WA?

10.56

pagi bapak, klu boleh tau perubahan saham d sektor apa ya pak?

10.57 ✓✓

Dari PT. DAMAI BANGUN JAYA
ada perubahan pemegang saham, direksi dan susunan pengurus perusahaan..

11.00



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. PT. DAMAI BANGUN JAYA

Proses pengajuan DIREKSI KOMISARIS, dengan nomor pengajuan 2024/01/06/30512-0002, tanggal 06 Januari 2024, telah dievaluasi oleh Ditjen Minerba dengan hasil sebagai berikut,

DITOLAK dengan keterangan

* - Belum melampirkan Surat Tugas Terbaru sebagai PIC MODI Pencatatan Dirkom dan Saham, ttd Direksi sesuai Data MODI, SK dan AKta - Belum melampirkan Copy KTP, NPWP pengurus Dirkom baru - belum melampirkan Data BO - Belum melampirkan persetujuan perubahan saham dari MESDM atau Gubernur sesuai kewenangan

Terima kasih,

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Kementerian ESDM

Harap segera menindaklanjuti, karena e-mail ini akan dihapus secara otomatis oleh



+62 813-4509-1709



+62 813-4509-1709 ~ADMIN

Foto



Untuk melengkapi data MODI 🙏 11.01

baik pak, silakan bermohon langsung k ptsp pak..

15.32 ✓✓

Apakah bisa kirim surat melalui email pak? 15.39

melalui wa ataupun email silakan pak 15.40 ✓✓

Baik, terimakasih .. 🙏 15.46

3/5/2024

🗑 Pesan ini dihapus 11.03



PERSYARATAN PENERBITAN PERU
BAHAN SAHAM.rar

RAR • 59 MB



11.05

sore pak, permohonan belum bermaterai ya pak?

16.03 ✓✓

Anda

sore pak, permohonan belum bermaterai ya pak?

Baik, saya akan ganti.. 🙏

16.04



Surat Permohonan PT. Damai Bangun Jaya.pdf

2 halaman • PDF • 12 MB



16.32



+62 852-4665-9998



6/5/2024

Selamat siang ibu.. mohon informasi terkait izin SDA kami atas nama PT. Primatunas Kharisma & PT. Sentosa Suksesutama bu..

14.03

selamat siang ibu, mohon maaf ibu blm dilakukan approve oleh atasan kami bu..sdh kami konfirmasi kembali ke beliau, hnya blm juga diapprove sampai saat ini

14.13 ✓✓

Anda

selamat siang ibu, mohon maaf ibu blm dilakukan approve oleh atasan kami bu..sdh kami konfirmasi kembali ke beliau, hnya bl...

Oh baik bu, prosesnya tinggal approve saja ya. Terimakasih ya bu informasinya 🙏

14.14

benar bu

15.07 ✓✓

14/5/2024

Selamat Pagi ibu.. mohon informasi terkait izin SDA kami atas nama PT. Primatunas Kharisma & PT. Sentosa Suksesutama bu, apakah sudah di approve ibu? .

09.39

selamat pagi bu, belum diapprove oleh kepala dinas kami bu 🙏

09.42 ✓✓



+62 852-4665-9998

kembali ke beliau, hanya blm juga diapprove sampai saat ini

14.13 ✓✓

Anda

selamat siang ibu, mohon maaf ibu blm dilakukan approve oleh atasan kami bu..sdh kami konfirmasi kembali ke beliau, hanya bl...

Oh baik bu, prosesnya tinggal approve saja ya. Terimakasih ya bu informasinya 🙏

14.14

benar bu 15.07 ✓✓

14/5/2024

Selamat Pagi ibu.. mohon informasi terkait izin SDA kami atas nama PT. Primatunas Kharisma & PT. Sentosa Suksesutama bu, apakah sudah di approve ibu?

09.39

selamat pagi bu, belum diapprove oleh kepala dinas kami bu 🙏

09.42 ✓✓

Anda

selamat pagi bu, belum diapprove oleh kepala dinas kami bu 🙏

Maaf apakah ada kendala bu? 🙏

09.45

tidak ada bu 10.43 ✓✓



Ketik pesan



Nomor : 070/SKD-SSU/KP-TJS/VI/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan informasi terhadap
proses penerbitan Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air PT. Sentosa Suksesutama

Tanjung Selor, 10 Juni 2024

Kepada Yth.
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Kalimantan Utara**
di-
Tanjung Selor

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti permohonan kami terhadap perizinan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atas nama PT. Sentosa Suksesutama, halmana terhadap permohonan tersebut telah kami lakukan input melalui sistem OSS sesuai kewenangannya dalam hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah provinsi Kalimantan Utara, maka melalui surat ini kami bermaksud menanyakan progres terhadap permohonan kami tersebut di atas. Mohon informasi lebih lanjut dari bapak terhadap proses notifikasi OSS yang kami ajukan sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, besar harapan kami agar sekiranya Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara dapat berkenan menjawab surat kami serta sekaligus memberikan arahan lebih lanjut terkait permohonan kami tersebut. Atas segala perkenan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Sentosa Suksesutama

**PT. SENTOSA
SUKSESUTAMA**

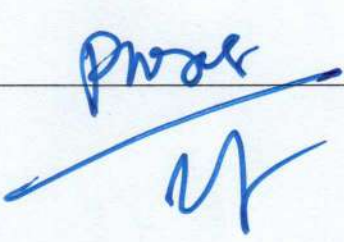
Ardiles Marco Mangudi
Kepala Perwakilan

Tembusan Yth :

- Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor ;
- Kepala DPUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Arsip.



LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : PT. Primatunas Kharisma	Diterima Tgl : 02 Juli 2024
No. Surat : 069/SKD-PTK/KP-TJS/VI/2024	No. Agenda :612
Tgl. Surat : 10 Juli 2024	Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Biasa ☐ Rahasia
Perihal : Permohonan Informasi Terhadap Proses Penerbitan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air PT. Primatunas Kharisma	
Diteruskan Kepada Yth. Sdr :	Disposisi :
☐ Sekretaris ☐ Kabid Perencanaan Promosi Dan Kerjasama ☐ Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ☒ Kabid Penyelenggaraan Layanan Perizinan ☒ Kabid Kajian Dan Pengaduan Layanan Perizinan	☐ Proses Lebih Lanjut ☐ Untuk Menjadi Perhatian ☐ Buat Laporan Kepada Kepala Dinas ☐ Tanggapan Dan Saran ☐ Jadwalkan ☐ Wakili ☐ Dampingi ☐ Tugaskan Staf ☐ Siapkan Bahan / Pointers / Penjelasan / Data ☐ Koreksi ☐ Koordinasikan ☐ Laporkan ☐ Monitor ☐ Diskusikan Bersama ☐ File / Arsip
Catatan : 	Diketahui, Kepala Dinas NIP. _____
Catatan :	Sekretaris / Kabid NIP. _____

Nomor : 069/SKD-PTK/KP-TJS/VI/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan informasi terhadap
proses penerbitan Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air PT. Primatunas Kharisma

Tanjung Selor, 10 Juni 2024

Kepada Yth.
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Kalimantan Utara**
di-
Tanjung Selor

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti permohonan kami terhadap perizinan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atas nama PT. Primatunas Kharisma, halmana terhadap permohonan tersebut telah kami lakukan input melalui sistem OSS sesuai kewenangannya dalam hal ini menjadi kewenangan dari Pemerintah provinsi Kalimantan Utara, maka melalui surat ini kami bermaksud menanyakan progres terhadap permohonan kami tersebut di atas. Mohon informasi lebih lanjut dari bapak terhadap proses notifikasi OSS yang kami ajukan sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, besar harapan kami agar sekiranya Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara dapat berkenan menjawab surat kami serta sekaligus memberikan arahan lebih lanjut terkait permohonan kami tersebut. Atas segala perkenan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Primatunas Kharisma

PT. PRIMA TUNAS
KHARISMA

Ardiles Marco Mangudi
Kepala Perwakilan

Tembusan Yth :

- Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor ;
- Kepala DPUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Arsip.

Informasi Tracking

Data Permohonan	
No Pendaftaran	0017019101042024036
Permohon	PT SENTOSA SUKSESUTAMA
Jenis Izin	Peretujuan Perizinan Berusaha Sektor PUPR
Jenis Permohonan	Izin Baru
Tanggal Pendaftaran	29 April 2024, Pukul : 13:16:53
Target Durasi	14 Hari

Patugas Front Office : STEPHANY MATRA SONDA, ST

Show 10 entries							Search:	
No	Menu	Durasi Pengerjaan	Waktu Awal	Waktu Akhir	User / Nama	Status	Aktifitas	
1	Menerima dan Memeriksa Serkas	12 Menit	29-04-2024, 13:12:06	29-04-2024, 13:24:48	Phany95 / STEPHANY MATRA SONDA, ST	Update	Kirim Ke Pelayanan	
2	Entri Data	15 Menit	29-04-2024, 13:24:48	29-04-2024, 13:40:11	ovika / OVIKA OKTAVIANA, S.E	Update	Entri Data	
3	Perimbangan Teknis / Evaluasi Serkas	8 Menit	29-04-2024, 13:40:11	29-04-2024, 13:48:23	ovika / OVIKA OKTAVIANA, S.E	Update	Penyusunan Serkas	
4	Penyusunan / Pencetakan Naskah Perizinan	4 Bulan, 2 Jam, 8 Menit	29-04-2024, 13:48:23	29-08-2024, 07:54:54	/	Update	Penyerahan Izin	
5	Izin Ditolak	Sedang Diproses	29-08-2024, 07:54:54	29-08-2024, 07:54:54	/	Insert		
6	Penyerahan Izin / Pengambilan Serkas	Selesai	29-04-2024, 13:48:23	29-04-2024, 13:48:23	/	Insert	Artsp	
Total Pengerjaan		4 Bulan, 2 Jam, 42 Menit						



anti Sipa



Selamat pagi 08.56

13/5/2024

Saya mau minta persyaratan izin penggunaan air tanah

08.56

Saya dri PT Mitra Kartika Sejati 08.57

selamat pagi, untuk lokasi dimana ibu? 09.02 ✓✓

Tarakan pak 09.02

baik bu, untuk Tarakan menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat . Untuk permohonan dan persyaratan dapat diakses dan dimohonkan melalui laman oss.go.id . Terima kasih

09.04 ✓✓

Utk air sumur pak 09.04

benar bu 09.04 ✓✓

Alasannya masuk ke pusat knp ta pak 09.04

Biar saya bisa jelaskan ke management 09.05

aturannya mmg bgitu bu, kalau kewenangan provinsi hanya DAS Wilayah Sungai Kayan (Tanjung Selor, Bulungan)

09.05 ✓✓

kalau dulu memang menjadi kewenangan provinsi, skrg sdh tdk ibu

09.08 ✓✓



Ketik pesan





+62 821-5467-3390



20/5/2024

Slmt pagi.. 🙏 09.35

Selamat Siang, silahkan Pak 14.22 ✓

Apakah bisa sy telepon pak? 14.24

boleh via chat saja pak, kami juga sedang melayani pemohon lain 🙏🙏 14.25 ✓

Baik pak.. 14.25

Apabila ingin membuka usaha bilyard, proses izin apa yang perlu dibuat pak? 14.26

Untuk biliar penganjuannya Online Bapak. melalui OSS 14.29 ✓

Rencana buka dimana pak? 14.29 ✓

Anda

Rencana buka dimana pak?

Rencana buka di Tanjung Selor pak.. 14.32

Anda

Untuk biliar penganjuannya Online Bapak, melalui OSS





+62 821-5467-3390



Baik, jadi Bapak membuat akun OSS dlu nanti setelah buat akun kita bisa ajukan permohonan biliar tersebut.

14.33 ✓

kalau bapak mau bisa ke DPMPTS Kaltara pak, nanti kami bantu

14.33 ✓

Anda

kalau bapak mau bisa ke DPMPTS Kaltara pak, nanti kami bantu

Baik pak, terima kasih informasinya pak. Jadi nanti saya bertemu dengan siapa pak?

14.35

Bapak rencana mau buka biliar an. Badan usaha apa perorangan pak?

14.35 ✓

nanti bisa bertemu dengan Help Desk kami an. Enrico ya pak, nanti akan dibantu

14.36 ✓

Anda

Bapak rencana mau buka biliar an. Badan usaha apa perorangan pak?

Kalau perorangan seperti apa dan kalau badan usaha seperti apa pak?

14.37

Kalau perorangan cukup menyiapkan KTP, NPWP dan email

14.37 ✓

Atau badan usaha seperti apa pak?

Ketik pesan



+62 821-5467-3390



Anda

Bapak rencana mau buka biliar an. Badan usaha apa perorangan pak?

Kalau perorangan seperti apa dan kalau badan usaha seperti apa pak?

14.37

Kalau perorangan cukup menyiapkan KTP, NPWP dan email

14.37 ✓

Atau bagusnya seperti apa pak?

14.37

Kalua Badan Usaha Bapak perlu membawa Akta pendirian dimana didalam Akta tersebut sudah memuat saha biliar, serta NPWP badan Usaha

14.38 ✓

Kalau perorangan dan rencana mau buka bilyard dengan 10 meja tidak masalah ya pak kedepannya?

14.38

kalau Bapak belum ada Badan usaha tidak apa2 pak, Perorangan saja 🙏

14.38 ✓

Anda

kalau Bapak belum ada Badan usaha tidak apa2 pak, Perorangan saja 🙏

Siap Bpk..

14.39



Ketik pesan





+62 821-5467-3390



14.38 ✓

Kalau perorangan dan rencana mau buka bilyard dengan 10 meja tidak masalah ya pak kedepannya?

14.38

kalau Bapak belum ada Badan usaha tidak apa2 pak, Perorangan saja 🙏

14.38 ✓

Anda

kalau Bapak belum ada Badan usaha tidak apa2 pak, Perorangan saja 🙏

Siap Bpk..

14.39

Nanti saya info lebih lanjut ya pak apabila saya kesana..

14.39

Terima kasih Bpk atas waktunya dan bantuannya..



14.39

+62 821-5467-3390 ~Racit

Kalau perorangan dan rencana mau buka bilyard dengan 10 meja tidak masalah ya pak kedepannya?

tidak masalah bapak

14.40 ✓

siap Bapak sama sama

14.40 ✓



Ketik pesan





+62 813-1112-9665



Nama saya suryo 14.08

21/5/2024

Mau mohon info untuk pembuatan akun terkait permohonan rekomendasi gubernur kaltara, apakah bisa diinformasikan kepada kami, terimakasih

Diedit 14.09

Alamat situs pembuatan akun nya, dan persyaratannya, terimakasih

14.09

+62 813-1112-9665 ~Suryo Lastandyono

Mau mohon info untuk pembuatan akun terkait permohonan rekomendasi gubernur kaltara, apakah bisa diinformasikan kepad...

mohon lebih detail untuk pembuatan rekomendasi terkait ijin apa pak?

14.57 ✓

rekomendasi penggunaan kawasan hutan 14.57

+62 813-1112-9665 ~Suryo Lastandyono

rekomendasi penggunaan kawasan hutan

untuk rekomendasi penggunaan kawasan hutan langsung diajukan ke kekantor kami Bapak, kelengkapannya sbntr kami fotokan

14.59 ✓

iya, saya dapat infonya ada harus buat akun online juga?

15.00

➡ Diteruskan



Ketik pesan





+62 813-1112-9665



➤ Diteruskan



Ceklis Rekomendasi Gubernur Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Ne...

DOCX • 40 KB

15.09 ✓

+62 813-1112-9665 ~Suryo Lastandyono

iya, saya dapat infonya ada harus buat akun online juga?

Iya betul pak, apa bapak sudah punya aku oss?

15.09 ✓

Akun oss sudah ada 15.10

Apakah nanti harus diajukan lewat oss? 15.11

+62 813-1112-9665 ~Suryo Lastandyono

Apakah nanti harus diajukan lewat oss?

diajukan ke kantor ptsp langsung bapak 15.15 ✓

nanti rekomnya keluarnya dalam bentuk print out atau harus download di OSS?

15.16

+62 813-1112-9665 ~Suryo Lastandyono

nanti rekomnya keluarnya dalam bentuk print out atau harus download di OSS?

print out bapak

15.19 ✓



Ketik pesan



baik terima kasih infonya 15.19

+62 813-1112-9665 ~Suryo Lastandyono

baik terima kasih infonya

sama sama Bapak 🙏

15.23 ✓



Ketik pesan



4/6/2024

CV kami memiliki 6 unit usaha yg semua statusnya sudah NIB Terbit

09.40

Tp setiap sy download dokumen nib selalu daftarnya cuma ada 5 unit usaha

09.40

mohon maaf bapak, boleh chat saja..krna kami juga sedang melayni pemohon lain 🙏

09.41 ✓✓

siap pak. sudah saya chat

09.42

+62 852-3699-9951 ~^

CV kami memiliki 6 unit usaha yg semua statusnya sudah NIB Terbit

masing2 usaha apakah masing2 NIB?

09.42 ✓✓

1 nib

09.42

atau KBLI yg bapak maksud?

09.42 ✓✓

+62 852-3699-9951 ~^

1 nib

ooh baik pak

09.43 ✓✓

bukan KBLI.

09.43



ooh baik pak

09.43 ✓✓

bukan KBLI. 09.43

boleh d share untuk NIBnya bapak? 09.43 ✓✓

2009220095401 09.44



P E M E R I N T A H R E P U B L I K I N D O N E S I A



nib nyar.pdf

3 halaman • PDF • 521 KB



09.46

[illegible]

5. Apakah lingkungan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat? Jika ya, apa saja dampaknya?

kbli yg ini tidak muncul di dokumen NIB pak.
padahal statusnya sudah NIB terbit

09.48

bagaimana pak? 09.54



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



NIB_CV HALAWA AMANI.pdf

3 halaman • PDF • 522 kB

12.37 ✓✓

silakan dicek ulang di akun bapak ya, td coba kami cetak ulang dr akun kami sdh muncul 6 KBLI di pencetakan NIB. Terima kasih

12.38 ✓✓

kalau tdk salah td yg tdk muncul yg KBLI 62019

12.39 ✓✓

Ok makasih pak 12.39



sama2 pak 15.41 ✓

Selamat siang bapak/ibu mohon maaf menanggung waktu nya, saya lussi dari DPUPR Kabupaten Bulungan. Terkait persyaratan rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan, apakah ada contoh format :

1. Persyaratan administrasi terdapat pada nomor 1. Surat permohonan bermaterai
2. Pakta integritas
3. Persyaratan teknis

Jika ada bisa kh di kirimkan, Terimakasih 🙏

11.27

Selamat Siang Ibu
untuk Format Permohonan Tidak ada, bebas saja ibu yang penting jelas isi permohonannya perihal apa dan tertuju kepada KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV KALTARA dan wajib bermaterai

Poin 2
untuk Fakta Integritas bagi Instansi pemerintah hanya membuat surat pernyataan bermaterai dengan memuat point a - f (yang ada di persyaratan)

Poin 3 (persyaratan teknis)
Dalam bentuk file elektronik (Softcopy) dan dalam format Shapefile (Shp)

Diedit 11.46 ✓

Baik bapak/ibu terimakasih atas informasinya 🙏

11.55



Ketik pesan



+62 853-9313-1614



+62 853-9313-1614

~154

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

Fitur keamanan

Blokir

Pesan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Klik untuk info selengkapnya.

Selamat sore
Mohon maaf 15.24

Saya ingin menanyakan terkait pencabutan izin 15.24

Apakah bisa dibantu terkait info dan lainnya 15.24

Trmksh mohon maaf 🙏 15.24

selamat sore, dari perusahaan apa bapak? dg alasan apa kalau kami boleh tau? 15.40 ✓✓

PT. harusmas Agro Utama pak 15.50

Kami menanyakan permohonan surat sanggahan kami yang telah kami sampaikan ke biro hukum pada tanggal 21 mei 2024 15.51

pakah izinnya terbit sdh melalui OSS pak? 15.53 ✓✓

Sudah pak 15.55

baik pak berarti untuk pencabutannya melalui OSS juga, untuk info lebih lanjut sy ksh kontak person bidang Dalak kami ya bapak..terima kasih

15.56 ✓✓

Baik pak trmksh banyak pak 15.56



Rizky Dalak

15.56 ✓✓

Kirim pesan

Tambah ke grup

Anda

baik pak berarti untuk pencabutannya melalui OSS juga, untuk info lebih lanjut sy ksh kontak person bidang Dalak kami ya bapak..terima kasih

Iya melalui oss

15.56

Anda

Rizky Dalak



Trmksh banyak 🙏 15.56

silakan hubungi beliau ya bapak. kebetulan yg membidangi terkait pencabutan izin d bidang dalak.

15.57 ✓✓



+62 853-9313-1614 ~154

Trmksh banyak 🙏

sama2 pak

15.57 ✓✓



Ketik pesan





PT. HARUSMAS AGRO UTAMA

Samarinda, 18 Mei 2024

Nomor : 005/PT. HARU/VI/2024
Lamp : 1 (SATU) RANGKAP
Perihal : Surat Sanggahan atas penolakan
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan
PT. Harusmas Agro Utama

Kepada
Yth. Bapak Gubernur
Ck. Biro Hukum
Provinsi Kalimantan Utara
di –
Tanjung Selor

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penolakan yang kami terima perihal Penolakan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Energi melalui Sistem OSS dengan Menolak Persyaratan atas nama:

Nama	: PT. HARUSMAS AGRO UTAMA
Nomor SK	: 757/114/IUP-OP/DPMPTSP.III/IV/2019 Tanggal 04 APRIL 2019.
Penerbit Izin	: Gubernur Kalimantan Utara
Lokasi	: Kabupaten bulungan – Provinsi Kalimantan Utara
Luas	: 100,43 Ha
Komoditas	: Batuan Galian C (Basalt)
Masa Berlaku Izin	: 5 Tahun (04 April 2019 s/d 04 April 2024)

Berdasarkan Surat ini kami bermaksud menyampaikan sanggahan atas Penolakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan ke PT. Harusmas Agro Utama dengan sistem OSS tanggal 25 maret 2024 sekaligus memohon Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara agar sekiranya dapat memberikan keringanan pemulihan Agar Investasi PT. Harusmas Agro Utama Bisa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan dapat mempertimbangkan kembali perihal penolakan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Harusmas Agro Utama.

PT. HARUSMAS AGRO UTAMA

Jl. Danau Semayang No. 013, Kota Samarinda, Telp. 0541 (6522354), Kalimantan Timur.
Email : harusmas.agroutamasmr@gmail.com



PT. HARUSMAS AGRO UTAMA

Adapun sanggahan kami atas penolakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan adalah bahwa hingga saat proses pembukaan blokir akun OSS PT Harusmas Agro Utama untuk melakukan pengajuan perpanjangan dan telah dilakukan upaya pembukaan blokir sejak oktober 2023 hingga selesai pada bulan maret 2024.

Saat bersamaan juga perusahaan kami melakukan proses pengajuan persetujuan RKAB tahun 2024, 2025, dan 2026 (bukti terlampir), pada tanggal 25 Juni 2024.

Juga dilakukan upaya pemberitahuan perpanjangan secara manual pada tanggal 22 Januari 2024 kepada kepala dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara serta menjabarkan kronologi hambatan yang dialami saat perpanjangan (terlampir).

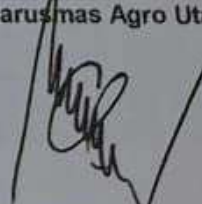
Oleh Karena hal-hal tersebut diatas, kami memohon dengan kerendahan hati atas kesediaan dari Bapak Gubernur untuk dapat berkenan mempertimbangkan sanggahan dan permohonan pemulihan dan perpanjangan izin perusahaan kami tersebut. Kami bersedia untuk beraudensi dengan Bapak Gubernur Atau tim terkait sewaktu-waktu guna menyampaikan sanggahan dan permohonan pemulihan dan perpanjangan izin serta secara langsung menyampaikan bukti – bukti terkait sanggahan kami dan kendala yang kami hadapi terkait keterlambatan pembayaran dan kewajiban-kewajiban yang harus kami penuhi sewaktu-waktu bila mana diperlukan.

Kami Memohon kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, agar dapat mempertimbangkan kembali Perihal Penolakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Harusmas Agro Utama.

Bersama Surat ini kami lampirkan Profil Perusahaan, Kronologi perizinan dan Surat Pernyataan.

Demikian Surat Sanggahan dan permohonan keringanan ini kami sampaikan atas waktu dan atensi dari Bapak Mentri mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Harusmas Agro Ut


Raymond Hutagalung
Direktur Utama

PT. HARUSMAS AGRO UTAMA

Jl. Danau Semayang No. 013, Kota Samarinda, Telp. 0541 (6522354), Kalimantan Timur.

Email : harusmas.agroutamasmr@gmail.com

Bukti Kronologis Permasalahan Pengajuan System OSS

Setelah menerima surat pemberitahuan masa izin IUP dari Kepala dinas ESDM Kalimantan Utara dengan nomor surat 543/430/540.3-DESDM, Tanggal 01 September 2023, kami langsung membuat dokumen – dokumen yang diperlukan dalam persyaratan perpanjangan izin tersebut. Setelah beberapa bulan dokumen yang telah kami susun telah selesai dan siap di upload ke system OSS namun. Kami tidak bisa akses dan setelah kami telusuri dan mendapat info dari beberapa sumber. Permasalahannya adaa terblokirnya akun AHU. Setelah itu kami melakukan koordinasi dengan pihak notaris rekanan kami agar tidak terblokir akun AHU PT. Harusmas Agro Utama.

Setelah kami susun persyaratan yang diperlukan pada tanggal 21 Desember 2023 Akun kami sudah dapat diakses dan bisa masuk ke OSS (terlampir bukti penyelesaian dengan notaris) Namun setelah kami masuk kesytem OSS lagi-lagi kami belum bisa mengupload persyaratan perpanjangan kami.

Setelah kami pelajari ternyata AKTA perusahaan tidak boleh ada bidang lain selain pertambangan jadi dalam satu akta harus satu bidang dan KBLI, sehingga kami berproses untuk perubahan akta dan dalam proses perubahan akta kami melakukan permohonan izin perpanjangan ke esdm kaltara dengan menyampaikan semua permasalahan yang kami hadapi. Setelah menunggu cukup lama dan pihak notaris juga membantu agar semua perubahan dapat dilakukan dengan cepat sehingga pada tanggal 28 Februari 2024 selesai untuk perubahan akta, SK kementerian dan update OSS (Terlampir bukti penyelesaian dengan notaris).

Setelah update OSS kami langsung membuat beberapa persyaratannya seperti : Pernyataan K3L, SPPL, PKKPR, Serta NIB PT. Harusmas Agro Utama. Kemudian kami koordinasi dengan beberapa Staff RKPM Pusat terkait persyaratan perpanjangan ini.

Tanggal 16 Maret 2024 kami telah selesai memenuhi persyaratan dan melakukan pengajuan ke system OSS untuk perpanjangan izin IUP OP PT. Harusmas Agro Utama. Dan Tanggal 25 Maret 2024 kami mendapat balasan Penolakan Perpanjangan izin IUP kami.

Demikian kronologis permasalahan di sytem OSS kami

PT. HARUSMAS AGRO UTAMA

Kronologi Permasalahan Pemanjangan Perizinan

Permohonan Perpanjangan Izin ini ada beberapa kendala yang kami hadapi, yaitu :

1. Terblokirnya Akun AHU (Administrasi Hukum Usaha) — Administrasi Badan Usaha Online PT. harusmas, namun kendala ini sudah kami atasi dan sudah terselesaikan.

2. Setelah Akun AHU kami sudah tidak terblokir, lalu permasalahan lanjutannya adalah Tidak Bisa teraksesnya untuk permohonan data perpanjangan izin IUP OP kami di Akun OSS (Online Single Submission) — Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Tidak Bisa diakses dikarenakan karena kode KBLI nya terhapus, mengapa terhapus dikarenakan di dalam Akta Pendirian Perusahaan terdapat banyak bidang usaha (Ada beberapa bidang usaha diluar pertambangan). Dimana didalam peraturan baru untuk satu perusahaan harus satu kode KBLI saja, dimana untuk bidang pertambangan tidak bisa digabung dengan bidang usaha lainnya.

Solusinya, kami harus merubah Akta Pendirian Perusahaan di Notaris rekanan kami dengan menghapus bidang usaha lainnya dimana bidang usahanya hanya ada bidang PERTAMBANGAN & PENGALIAN, dimana hal ini membutuhkan waktu. Semoga kami dapat mengatasinya dalam waktu dekat sehingga kami cepat juga melakukan perpanjangan izin melalui Akun OSS (Online Single Submission) — Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Hormat Kami,
PT. Harusmas Agro Utama
Ditandatangani
Raymond Hutagalung



PT. HARUSMAS AGRO UTAMA

DETIL RESUME PERIZINAN BERUSAHA

Pencarian...

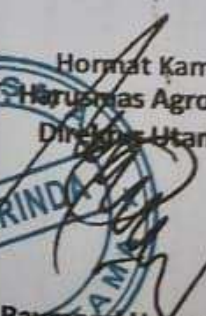


No	#	Detil Respon Izin	Tanggal Terkirim	Waktu Terkirim	Keterangan	Status Izin
1			25/03/2024	25/03/2024	(1) Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2020 pasal 45 ayat (3) huruf (b) menyatakan bahwa 'paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau IUP Operasi Produksi batuan; (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara sudah memberitahukan kepada PT. Harusmas Agro Utama melalui surat nomor: 543/430/540.3-DESDM tanggal 01 September 2023 perihal Pemberitahuan Masa Berakhir Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi; dan (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara sudah memberitahukan berdasarkan surat dari PT Harusmas Agro Utama nomor: 002/PT HAU/2024 tanggal 15 Januari 2024 kepada PT. Harusmas Agro Utama melalui surat nomor: 500.10.2.3/95/DESDM-2 tanggal 24 Januari 2024 perihal Pemberitahuan	• Penolakan Persyaratan

Item Per 10
Halaman



Direkomendasikan untuk menyurat Kembali.

Hormat Kami,
PT. Harusmas Agro Utama
Direktur Utama

Raymond Hutagalung



+62 822-5022-5220

14/6/2024

🔒 Pesan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Klik untuk info selengkapnya.

[14/6 08.20] -: Pagi bu, saya april dari Tengayu II

[14/6 08.21] -: ljin bertanya bu untuk kepengurusan SIKPI apakah tidak perlu melampirkan hasil cek fisik kapal ya bu? Tapi di aplikasi OSS masih terdapat persyaratan, mohon arahan

09.38

pagi bapak, baik pak segera kami lakukan perbaikan persyaratan pak. mohon ditunggu bapak 🙏

10.46 ✓✓

sudah ya bapak. silakan dicek kembali, mohon maaf ya pak 🙏

10.55 ✓✓

Sudah bagaimana ya ka, apakah tetap melampirkan cek fisik kapal? 10.57

seharusnya tidak muncul lg bapak, krna sdh kami lakukan penghapusan untuk persyaratan berita acara cek fisik

11.04 ✓✓

mkdsy, coba lakukan permohonan ulang, apakah masih muncul persyaratan cek fisik atau tidak, krna sdh kami lakukan perbaikan di persyaratannya pak

11.05 ✓✓

Baik, mksh infonya, akan kami cek ka 11.06

baik pak 11.07 ✓

Hari ini

Selamat pagi 08.37

Izin bertanya terkait sertifikat standard
yg belum diverifikasi 08.39

Sampai saat ini belum terverifikasi 09.36

Selamat pagi
Maaf bisa disebutkan jenis izin yang
diurus dan atas nama siapa bapak/Ibu?

10.57 ✓✓

Selamat pagi kami dari PT citra sawit
lestari 10.58

Saya dengan Herdadi 10.59

Untuk sertifikat standard kbli 10431
10.59

Formulir Pemenuhan Standar Usaha

Web: www.kemendagri.go.id
Regulasi: Undang-Undang No. 10/2008
Profil: Badan, Kementerian, Lembaga
Nama Pemohon: Herdadi, Kepala Standar
Jenis: Penerima: 1/2019

Carikan:
1. 1/2019/2019/2019

No	Berkas Data	Status
1	Berkas Data	1/2019/2019/2019
2	Berkas Data	1/2019/2019/2019
3	Berkas Data	1/2019/2019/2019

11.00

KBLI 10431
Nomor Kegiatan Usaha:
20240-1170-9164-9055-2816

11.00

Mulai mengurus izin dari bulan berapa
bapak? Biar kami teruskan utk ditelusuri

11.02



+62 818-0816-1574



Tidak semua informasi mengenai perizinan dan kegiatan perizinan, persyaratan, penunjang perizinan, dan kegiatan lain yang berkaitan.
Pengantar dan Laporan
Membaca dan memahami serta memahami yang ditugaskan pada saat ini dan di masa depan.

11.00

KBLI 10431

Nomor Kegiatan Usaha:

20240-1170-9164-9055-2816

11.00

Mulai mengurus izin dari bulan berapa bapak? Biar kami teruskan utk ditelusuri

11.02 ✓✓

Baik pak sebentar saya cek disistem

11.03

TL RESUME PERIZINAN BERUSAHA

Pencarian...



#	Detail Respon Izin	Tanggal Terkirim	Waktu Terkirim	Keterangan	Status Izin
		08/05/2024	08/05/2024	Perusahaan telah siap beroperasi dan berproduksi sesuai dengan bentuk acara verifikasi no.500.2.2/277/DPK-URM dan Keputusan No. 100.3/25K/DPK-URM	11.07



terlampir untuk submit datanya

11.08

kami submit tanggal 08 Mei 2024 setelah diverifikasi oleh dinas perindustrian prov

11.09

mohon informasi selanjutnya bapak/ibu terima kasih

11.14

sampai tanggal 14 Juni 2024 belum di verifikasi oleh pihak DPMPTSP Prov.Kaltara ya Bapak?

Baik, kami teruskan dulu keatasan



11.16 ✓✓

betul bapak/ibu

11.16



20/6/2024

Selamat siang Pak.

12.21

isak

☺ Selamat siang Pak.



Izin konfirmasi surat permohonan kami yg ini Pak. 🙏 12:21

12.21

Anda

siang pak, belum dilakukan approve oleh kadis pak 🙏

Baik Pak. 🙏

14.25

siang pak, belum dilakukan approve oleh kadis pak 🙏 14.16

14.16 ✓



isak

Izin konfirmasi Pak, untuk surat permohonan yang kami masukkan tanggal 10 ini Pak ? 🙏

10.19

selamat siang bapak, mohon maaf bapak blm diapprove kadis pak.. 11.13 ✓✓

oiya bapak, jika berkenan boleh bapak via chat untuk menanyakan terkait MODI PT TNI, agar kami bisa teruskan ke kadis pak 🙏

11.14 ✓✓

karena sdh lama atau juga bs dengan alasan2 yg lain pak, agar segera kami teruskan 11.15 ✓✓

Anda

oiya bapak, jika berkenan boleh bapak via chat untuk menanyakan terkait MODI PT TNI, agar kami bisa teruskan ke kadis pak 🙏

Iye Pak.

Terkait permohonan MODI PT TNI, sudah sementara kami urus di Kementerian ESDM Pak. Tinggal melengkapi surat pengantar pendaftaran MODI yang kami mohonkan ini Pak. 🙏

11.23

siap pak, izin sy teruskan wa bapak ya.. 11.26 ✓✓

Anda

siap pak, izin sy teruskan wa bapak ya..

Iye Pak, mudah-mudahan surat pengantar bisa terbit Pak.

Terima kasih Pak. 🙏

11.28

iya pak 11.29 ✓✓

Selamat pagi Pak.

Izin konfirmasi info surat kami Pak. 🙏 09.36



+62 852-8540-5808



1/7/2024



pdf

3 halaman • PDF • 135 kB



SK_0020318201052024036NonSE.pdf

12.00 ✓✓

Terimakasih min 🙏 12.00

Anda

SK_0020318201052024036NonSE.pdf

Min 12.13

Mau tanya 12.13

Nama yayasan bisa di ganti nama panti atau LKS 12.13

+62 852-8540-5808

Foto

Ganti nama LKS generasi bersinar 12.14

Baik min 14.40

2/7/2024

+62 852-8540-5808

Nama yayasan bisa di ganti nama panti atau LKS

pagi bapak, untuk nama yayasan kami brdasar pada permohonan, Akta Notaris, AHU, NPWP. Apabila ingin diubah namanya, silakan merubah dokumen yg tersebut di atas pak. terima kasih

09.04 ✓✓

untuk akta bisa akta cabang, dan NPWP cabang 09.04 ✓✓



+62 812-5406-456



Anda

1/7/2024

Tanda Daftar Yayasan Bangun Generasi.pdf

Mau tanya bpk / ibu kalau saya baca tanda daftar lembaga dan ijin ops. Ijin ops dlm hal ini apa sdh termasuk kami bs menjalankan panti nya? Atau kami msh harus urus ijin panti lagi? Soalnya disitu tdk ada disebutkan ttg panti generasi bersinar

18.12

2/7/2024

pagi bu, benar bu tdk perlu urus izin operasional lagi..nnti hanya memerlukan perpanjangan 3 bulan sebelum izin berakhir, terima kasih

09.03 ✓✓

Ok siap terimakasih 🙏

10.28

SENIN

Selamat siang.

Ingin konfirmasi terkait sikpi a.n agung walid 🙏 13.49

+62 853-3241-3569 ~Teguh Karya

Selamat siang.

Ingin konfirmasi terkait sikpi a.n agung walid 🙏

Siang juga Bapak, mohon ditunggu Bapak masih menunggu balasan surat pertimbangan teknis dari Dinas Perikanan Provinsi 🙏🙏

14.32 ✓✓

KEMARIN

Selamat siang pak.

Ingin konfirmasi terkait sikpi a.n. agung walid (SB. Bunyu express 02) 14.48

siang pak, masih proses dikami pak, menunggu approval dari atasan kami. 15.10 ✓✓

HARI INI

Selamat pagi pak.

Mohon izin terkait sikipnya pak.

Soalnya kami sudah ditanya²in sama psdkp dan syahbandar perikanan. 09.18

Speed tidak akan bisa jalan pak. 🙏🙏🙏 09.18

+62 853-3241-3569 ~Teguh Karya

Speed tidak akan bisa jalan pak. 🙏🙏🙏

Mohon ditunggu Bapak 🙏

09.23 ✓✓

Baik pak. Mohon bantuannya yah pak 🙏 09.24



Ketik pesan





SLM TRK _ AGUNG...



Pengajuan saya belum selesai². 11.47

Mohon bantuannya untuk pengajuan sikpi atas nama agung walid (SB. Bunyu express 02) 🙏

11.49

Selamat siang Bapak, setelah dicek di info tracking, berkas permohonan diajukan pada tanggal 25 Juni 2024 ya Bapak?

Barusan dicek disistem aplikasi Pesona, proses tinggal menunggu approve/ verifikasi dari Kepala Dinas 🙏

Mudahan segera ditindak lanjuti ya Pak, jika sudah nt akan diinfokan oleh admin bidang perizinan, terima kasih 🙏

Diedit 14.17 ✓✓



SLM TRK _ AGUNG...



Dan untuk pengajuan sebenarnya
pengajuan kami sebelum tanggal 25 juni,
hanya saja ada persyaratan baru yang
harus dipenuhi yaitu e-BKP dan SKPP.



14.22

Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kalimantan Utara 2024

Your response has been recorded.

[Submit another response](#)

This content is neither created nor endorsed by Google.
[Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

14.28

baik bapak, mudahan segera
ditindaklanjuti Kepala Dinas kami

akan segera diinfokan jika sudah selesai



14.29 ✓✓

Baik terima kasih 🙏

Mohon bantuannya yah pak/Ibu untuk SIKPInya.

Soalnya kami sudah ditanyain sama PSDKP dan Syahbandar perikanan.

Sudah beberapa minggu speed kami nda bisa jalan pak/Ibu.

Gaji karyawan jadi tertunda. Mohon sekali bantuannya 🙏

14.33

baik, saya teruskan ke atasan untuk ditindaklanjuti 🙏

14.36 ✓✓

Terima kasih banyak pak/Ibu... 🙏

Mohon maaf merepotkan 🙏

14.37



SLM TRK _ AGUNG...



Pengajuan saya belum selesai². 11.47

Mohon bantuannya untuk pengajuan sikpi atas nama agung walid (SB. Bunyu express 02) 🙏

11.49

Selamat siang Bapak, setelah dicek di info tracking, berkas permohonan diajukan pada tanggal 25 Juni 2024 ya Bapak?

Barusan dicek disistem aplikasi Pesona, proses tinggal menunggu approve/ verifikasi dari Kepala Dinas 🙏

Mudahan segera ditindak lanjuti ya Pak, jika sudah nt akan diinfokan oleh admin bidang perizinan, terima kasih 🙏

Diedit 14.17 ✓✓

Baik terima kasih 🙏

Mohon bantuannya yah pak/Ibu untuk SIKPInya.

Soalnya kami sudah ditanyain sama PSDKP dan Syahbandar perikanan.

Sudah beberapa minggu speed kami nda bisa jalan pak/Ibu.

Gaji karyawan jadi tertunda. Mohon sekali bantuannya 🙏

14.33

baik, saya teruskan ke atasan untuk ditindaklanjuti 🙏

14.36 ✓✓

Terima kasih banyak pak/Ibu... 🙏

Mohon maaf merepotkan 🙏

14.37



SLM TRK _ AGUNG...



Dan untuk pengajuan sebenarnya
pengajuan kami sebelum tanggal 25 juni,
hanya saja ada persyaratan baru yang
harus dipenuhi yaitu e-BKP dan SKPP.



14.22

Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kalimantan Utara 2024

Your response has been recorded.

[Submit another response](#)

This content is neither created nor endorsed by Google.
[Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

14.28

baik bapak, mudahan segera
ditindaklanjuti Kepala Dinas kami

akan segera diinfokan jika sudah selesai



14.29 ✓✓



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lantai I, Kode Pos 77212
Email : dpmptsp.provkaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

LEMBAR DISPOSISI	
Surat Dari : Ombudsman	Diterima Tgl : 05 Agustus 2024
No. Surat : T/173/LM.26-33/012418.2024/VIII/2024	No. Agenda : 761
Tgl. Surat : 01 Agustus 2024	Sifat :
Perihal : Permintaan Klarifikasi	☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Biasa ☐ Rahasia
Diteruskan Kepada Yth. Sdr :	Disposisi :
☐ Sekretaris ☐ Kabid Perencanaan Promosi Dan Kerjasama ☒ Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ☒ Kabid Penyelenggaraan Layanan Perizinan ☒ Kabid Kajian Dan Pengaduan Layanan Perizinan	☐ Proses Lebih Lanjut ☐ Untuk Menjadi Perhatian ☐ Buat Laporan Kepada Kepala Dinas ☐ Tanggapan Dan Saran ☐ Jadwalkan ☐ Wakili ☒ Dampingi ☐ Tugaskan Staf ☒ Siapkan Bahan / Pointers / Penjelasan / Data ☐ Koreksi ☐ Koordinasikan ☐ Laporkan ☐ Monitor ☐ Diskusikan Bersama ☐ File / Arsip
Catatan : 	Diketahui, Kepala Dinas NIP. _____
Catatan :	Sekretaris / Kabid NIP. _____



**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jl. Kusuma Bangsa No. 33, Kota Tarakan 77121
Telp. 0551-3805684 Kontak Layanan 0811 274 3737
Email: kaltara@ombudsman.go.id website : www.ombudsman.go.id

Nomor : T/173/LM.26-33/012418.2024/VIII/2024
Sifat : Terbatas
Hal : Permintaan Klarifikasi

1 Agustus 2024

Yth. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
Jl. Rambutan, Gedung Gadis, Tanjung Selor

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara telah menerima laporan dari Sdr. Afrijon dengan Nomor Agenda: 012418.2024, perihal Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait tindak lanjut penyelesaian keberatan atas penerbitan izin dan rencana kegiatan PT. Ruby Selaras Dipa Dharma di atas izin usaha perkebunan PT. Sanjung Makmur. Uraian laporan sebagai berikut:

1. Pelapor merupakan Direktur PT. Sanjung Makmur yang memiliki izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Bulungan dengan nomor: 521/04/Distan-III/XI/2004.
2. Pada Maret 2024, Pelapor mengetahui bahwa terdapat izin dan rencana kegiatan usaha pertambangan PT. Ruby Selaras Dipa Dharma berupa Surat Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari DPMPTSP Provinsi Kaltara Nomor: 757/66/WIUP/DPMPTSP.III/XI/2020 tertanggal 25 November 2020, dan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Rencana Kegiatan Eksplorasi Batuan di Desa Kendari dan Desa Anjar Arif, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara oleh PT. Ruby Selaras Dipa Dharma dari DPMPTSP Kaltara Nomor: 757/10/PL/DPMPTSP.III/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023, di lokasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sanjung Makmur di Desa Kendari dan Desa Anjar Arif, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Pelapor mengetahui hal tersebut setelah adanya upaya perusakan yang diduga dilakukan oleh oknum PT. Ruby Selaras Dipa Dharma pada lokasi perkebunan PT. Sanjung Makmur.
3. Pada 25 Maret 2024, Pelapor menyampaikan keberatan atas izin dan rencana kegiatan PT. Ruby Selaras Dipa Dharma tersebut ke Gubernur Kalimantan Utara melalui surat. Dalam surat tersebut, Pelapor menyampaikan keberatan karena areal tersebut berada dalam izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sanjung Makmur yang sudah kadastrai

dan sudah ada ikatan kerjasamanya dengan masyarakat setempat. Pada areal tersebut sebagian besar sudah dilakukan ganti rugi lahan kepada masyarakat oleh PT. Sanjung Makmur dan sebagian terdapat sertifikat plasma masyarakat. PT. Sanjung Makmur membayar PBB sejak izin lokasi diterbitkan tahun 2004. Jalan akses menuju lokasi dan jetty (pelabuhan/dermaga) di sekitar lokasi tersebut dibangun oleh PT. Sanjung Makmur. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bulungan dan RTRW Provinsi Kalimantan Utara, lokasi tersebut adalah kawasan budidaya perkebunan, bukan kawasan pertambangan. Sampai saat ini pihak PT. Ruby Selaras Dipa Dharma tidak pernah menghubungi dan/atau berkoordinasi dengan pihak PT. Sanjung Makmur baik dalam pengurusan perizinan, AMDAL, dan lain-lain. Dalam surat tersebut, Pelapor juga memohon agar tidak melanjutkan serta membatalkan perizinan PT. Ruby Selaras Dipa Dharma di lokasi perkebunan PT. Sanjung Makmur. Namun tidak mendapatkan tanggapan atas penyampaian keberatan tersebut.

4. Pada 24 Mei 2024, Pelapor kembali bersurat kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk menyampaikan keberatan yang sama seperti sebelumnya, serta menyampaikan aktifitas perusakan kelapa sawit di lokasi izin usaha perkebunan PT. Sanjung Makmur masih terjadi bahkan semakin meluas. Pelapor menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, koordinasi ataupun diajak bicara atas pemberian izin dan kegiatan di atas lahan perkebunan PT. Sanjung Makmur tersebut. Pelapor juga memohon penyelesaian atas permasalahan tersebut.
5. Pada 29 Mei 2024, Pelapor menyampaikan keberatan atas izin dan kegiatan PT. Ruby Selaras Dipa Dharma di atas izin usaha perkebunan PT. Sanjung Makmur melalui surat kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara. Pelapor juga menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, koordinasi, ataupun diajak bicara atas pemberian izin dan kegiatan di atas lahan perkebunan PT. Sanjung Makmur tersebut. Pelapor juga memohon untuk dapat membatalkan perizinan PT. Ruby Selaras Dipa Dharma yang berada di atas izin usaha perkebunan Pelapor.
6. Pada 31 Mei 2024, dilakukan peninjauan lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan verifikasi pengaduan dugaan perusakan lingkungan oleh PT. Ruby Selaras Dipa Dharma dengan hasil verifikasi yang tercantum dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan dengan nomor: 02/BA/PSSL-BID.1/V/2024.
7. Pelapor keberatan karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian laporan, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara akan melakukan permintaan klarifikasi pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2024

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Mengingat pentingnya agenda tersebut, diharap Saudara dan/atau Pejabat yang membidangi dapat hadir dan menyiapkan dokumen terkait laporan tersebut. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (1) huruf a, bahwa Ombudsman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdri. Rahmah, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara (08115915581/kaltara@ombudsman.go.id).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Maria Ulfah

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
2. Gubernur Kalimantan Utara;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.



BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR: BA-026/LM.26-33/012418.2024/VIII/2024

Bahwa pada Hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul 09.00 WITA, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Masyarakat dengan Nomor Agenda: 012418.2024 mengenai Dugaan Penundaan Berlarut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait tindak lanjut penyelesaian keberatan atas penerbitan izin dan rencana kegiatan PT. Ruby Selaras Dipa Dharma Selaras Dipa Dharma di atas izin usaha perkebunan PT. Sanjung Makmur.

Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1. Nama : Rahmah
Jabatan : Asisten Pemeriksaan
2. Nama : Rizwan
Jabatan : Asisten Pemeriksaan

Telah melakukan pemeriksaan, terhadap:

Instansi : DPMPTSP Kalimantan Utara
Legal standing : Terlapor

Hasil pemeriksaan:

1. Terkait dengan SOP Wilayah Izin Usaha Pertambangan diterbitkan oleh PTSP kaltara pada tahun 2020, masih menggunakan Kepmen 1798 K/30/MEM/2018. Dimana pada saat ada permohonan WIUP, DPMPTSP hanya melakukan *checklist* kelengkapan dokumen persyaratan, kemudian menindaklanjuti dengan meminta rekomendasi teknis kepada OPD teknis, dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Kaltara, untuk melakukan evaluasi berdasarkan Kepmen dan memberikan pertimbangan atau rekomendasi teknis kepada DPMPTSP Kaltara. Jika telah ada rekomendasi dari OPD teknis WIUP akan diterbitkan.
2. Terkait Permohonan CV. Ruby Selaras Dipa Dharma, setelah dilakukan evaluasi terkait persyaratan dokumen (terlampir) dan telah mendapatkan rekomendasi maka diterbitkan WIUP CV. Ruby Selaras Dipa Dharma pada tanggal 25 November 2020 dengan Nomor: 757/66/WIUP/DPMPTSP.III/11/2020.

R. H. S. A.

3. Dalam informasi tata ruang yang diterbitkan oleh DPUTR Kabupaten Bulungan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kaltara tidak menyebutkan di lokasi tersebut ada IUP Perkebunan PT. Sanjung Makmur. Informasi tata ruang merupakan salah satu syarat dalam penerbitan WIUP.
4. Setelah terbit undang-undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, pemberian WIUP dan Izin Usaha Pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
5. WIUP yang dimiliki oleh CV. Ruby Selaras Dipa Dharma seluas 310 Ha.
6. Terkait dengan tumpang tindih antara PT sanjung makmur dan PT Ruby Selaras Dipa Dharma, dalam hal ini DPMPTSP tidak mengetahui secara presisi terkait dengan lokasi yang disengketakan tersebut, karena yang lebih mengetahui letak dan wilayahnya adalah OPD Teknis.
7. DPMPTSP baru mengetahui permasalahan tumpang tindih perizinan tersebut setelah ada kunjungan dari PT Sanjung Makmur ke DPMPTSP Kaltara tanggal 27 Mei 2024 dan melalui Surat dari PT. Sanjung Makmur pada tanggal 29 Mei 2024, kemudian segera ditindak lanjuti dengan melakukan rapat dengan OPD terkait, dalam hal ini Dinas ESDM dan DLH Kaltara pada tanggal 10 Juni 2024 yang secara garis besar disepakati akan diagendakan rapat bersama dengan DPMPTSP Bulungan. Berdasarkan informasi telah terjadi rapat tanggal 24 Juni 2024, oleh DPMPTSP Kab. Bulungan yang dihadiri pula oleh Dinas ESDM Kaltara. Namun DPMPTSP Kaltara tidak ikut dan/atau tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Berdasarkan informasi juga, hasil rapat berupa rencana untuk mediasi kedua belah pihak (pelaku usaha).
8. Bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal DPMPTSP Kaltara, terkait permasalahan tersebut akan melakukan pengawasan insidental, namun belum terlaksana karena DLH Kaltara telah melakukan kunjungan ke lokasi tersebut. DPMPTSP Kaltara masih menunggu adanya rapat bersama yang menghadirkan semua pihak demi efektif dan efisien penyelesaian masalah.
9. Pelaku usaha bertanggung jawab atas keabsahan kelengkapan dokumen WIUP, apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data berkas permohonan, maka DPMPTSP Kaltara dapat mencabut WIUP tersebut atas rekomendasi dari instansi atau pihak terkait.
10. IUP eksplorasi PT. Ruby Selaras Dipa Dharma saat ini dalam kondisi penghentian sementara (suspend) dan akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2025 (terlampir) apabila tidak mengajukan permohonan peningkatan ke IUP operasi produksi. IUP eksplorasi seharusnya belum melakukan aktifitas pembukaan lahan, ssebelum memiliki IUP Operasi Produksi.
11. Terkait dengan informasi tata ruang dari DPUTR Kab. Bulungan, RTRW pada lahan tersebut tidak hanya kawasan perkebunan, tapi ada 4 kawasan, sebagaimana dokumen yang dilampirkan dalam permohonan WIUP. Penelisikan kesesuaian RTRW merupakan

Handwritten signature and initials in blue ink.

- kewenangan OPD teknis, bukan DPMPTSP Kaltara. Namun, secara aturan dimungkinkan untuk terbit WIUP di atas kawasan perkebunan selama ada kesepakatan B to B (pemilik lahan dengan pelaku usaha dan/atau pelaku usaha dengan pelaku usaha).
12. Sejak terbit Perpres 55 Tahun 2022, pemberian WIUP dan IUP mineral bukan logam dan batuan didelegasikan ke Pemerintah Provinsi. Adapun WIUP dan IUP pertambangan komoditas lainnya masih menjadi kewenangan BKPM Republik Indonesia, sejak Desember tahun 2020.
 13. DPMPTSP hanya memiliki database terkait dengan data SK WIUP dan IUP yang diterbitkan, DPMPTSP tidak memiliki secara detail dan rinci terkait dengan pemetaan wilayahnya. Adapun pemetaan wilayah IUP dan WIUP ada pada Dinas ESDM Kaltara dan ada dalam *database* nasional pada sistem MODI.
 14. Pada tahun 2020 pengajuan WIUP CV. Ruby Selaras Dipa Dharma menggunakan badan usaha CV, namun pada tahun 2023 dilakukan pemindahtanganan IUP eksplorasi dari CV. Ruby Selaras Dipa Dharma ke PT. Ruby Selaras Dipa Dharma.
 15. Terkait dengan WIUP CV. Ruby Selaras Dipa Dharma yang terbit pada tahun 2020, terjadi kesalahan pengetikan dari DPMPTSP Kaltara yang seharusnya badan usaha berbentuk CV namun diterbitkan berupa PT. Hal tersebut telah di koordinasikan dengan BKPM terkait kesalahan ketik tersebut (surat terlampir). Adapun badan usaha berbentuk CV atau PT tidak membedakan persyaratan maupun setoran biaya pencadangan wilayah, karena biaya tersebut bergantung pada luasan wilayah.
 16. Berdasarkan PKKPR dan PKPLH yang terbit pada tahun 2023, luasan PT. Ruby Selaras Dipa Dharma seluas 193,71 Ha. Penciutan wilayah dapat dilakukan pada saat peningkatan ke IUP operasi produksi.

Demikian berita acara ini dibuat guna kepentingan pemeriksaan pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 8 Agustus 2024

Penata Perizinan Ahli Muda,

Tim Pemeriksa,


Erfany CN



Penata Perizinan Ahli Muda



Dedy Setiawansyah

Analisis Dokumen Perizinan



S. Merisati Silitonga

Pengawas Penanaman Modal



Siradjuddin







+62 822-1130-7952



12/8/2024

🔒 Pesan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Klik untuk info selengkapnya.

Halo dpmtsp kaltara 11.30

Saya mau tanya mengenai informasi KKPR 11.31

Apakah pengajuan kkpr untuk tambak itu dari oss atau manual ya 11.32

Selamat Siang Bapak/Ibu, kalau boleh tau dimana lokasi tambaknya bapak/ibu? 11.46 ✓✓

Di pulau itai kabupaten nunukan 12.09

OSS pak/bu, biasanya terikut dengan perizinan berusaha pak/bu, kalau tambak air payau KBLI 03261 pak/bu, tergantung dengan modalnya lagi ya pak/bu 15.16 ✓✓

Kalo tambaknya uk 2000 Ha pak 15.23

13/8/2024

Selamat sore bapak/ibu, mhn maaf chat bapak baru sempat kami baca..mhn izin ralat bapak/ibu untuk pemilihan di KBLI 0325.. disesuaikan lagi dg jenis budidaya bapak/ibu ya. Kalau untuk KKPR tdk perlu pak krna merupakan di perairan darat. 🙏 15.17 ✓✓



+62 813-6705-2109



end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.



+62 813-6705-2109

~ Purnawarman

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

Fitur keamanan

Blokir

Tambah



Panggilan suara tak terjawab

Ketuk untuk menelepon balik 15.39

selamat sore, silahkan tinggalkan pesan jika ada pengaduan tentang proses perizinan di DPMPTSP Prov Kaltara 🙏

16.36 ✓✓

Sampai saat ini perusahaan bongkar muat PT usaha pagun damo pihak ptsp belum mengeluarkan ijin.. proses nya terlalu sulit dan panjang..tks

18.47



Ketik pesan





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERIZINAN SISTEM ONLINE KALIMANTAN UTARA (PESONA)

Data Pembustan Izin

Filter Nomor Pendaftaran

Nomor Pendaftaran

Carit Data

Filter Data

☒ PERMOHONAN ☐ PENETAPAN

Tanggal Awal

Tanggal Akhir

Filter Cetak Nota Pengantar

100 entries							Search: di antara para	
No	No Pendaftaran Tanggal Permohonan Asal Permohonan	Pemohon	Jenis Izin Objek Izin/Lokasi Izin	No Surat Keputusan Tanggal Surat Keputusan	Status	Aksi		
9	0031712301082024036 23 Agustus 2024 DPMPTSP Prov. Kaltara	PT. USAHA FAGUN DAMO	Persetujuan Perizinan Berusaha (OSS) Sektor Perhubungan JL. PEMUDA	748/29/PPB.DISHUB/DPMPTSP.II/VIII/2024 23 Agustus 2024	Template 'SE BSc' Belum Dicetak	 KEPALA		



+62 812-5806-6054



termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.



+62 812-5806-6054

~ Borneo Membangun

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

 [Fitur keamanan](#)

 **Blokir**

 **Tambah**

Selamat pagi Bapak/Ibu admin, mohon informasi permohonan IUJP atas nama PT Borneo Membangun ada kendala apa sudah 1 bulan lebih belum terbit izinnya ? Terima kasih

Diedit 08.11

Selamat siang
setelah dilakukan pengecekan ke
Bagian Back Office
Permohonan IUJP atas nama
PT.BORNEO MEMBANGUN sampai saat
ini belum ada ARAHAN atasan untuk
diproses 🙏
mohon maaf sebelumnya

11.23 ✓✓



Ketik pesan





Informasi Data Detail

Nama Izin	Persetujuan Peralihan Berusaha (OSS) Sektor ESDM
No / Tgl Pendaftaran	0039317001092024034 / 24 September 2024
Status Permohonan	Izin Disetujui
Nomor SK	757/40/PPB-ESDM/DPMPSTP.III/IX/2024
Tanggal SK	24 September 2024
Durasi Penyelesaian	

DATA PEMOHON & PERMOHONAN	DATA PERUSAHAAN	DATA TEKNIK	ARSIP / PERSYARATAN	TRACKING PERIZINAN	BERKAS IZIN
---------------------------	-----------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------

Show 10 entries					Petugas Front Office : TAUFIK HIDAYAT Petugas Penabin Nomor : S. MERI SATI SILITONGA, S.E , Tanggal : 2024-09-24 14:28:21				
Search:									
No	Memo	Durasi Pengerjaan	Waktu Awal	Waktu Akhir	User / Nama	Status	Aktifitas		
1	Menerima dan Memeriksa Berkas	5 Menit	24-09-2024, 14:09:34	24-09-2024, 14:15:13	taufik / TAUFIK HIDAYAT	Update	Kirim Ke Pelayanan		
2	Entri Data	12 Menit	24-09-2024, 14:15:13	24-09-2024, 14:27:14	mer / S. MERI SATI SILITONGA, S.E	Update	Entri Data		
3	Pertimbangan Teknis / Evaluasi Berkas	16 Detik	24-09-2024, 14:27:14	24-09-2024, 14:27:30	mer / S. MERI SATI SILITONGA, S.E	Update	Penyusunan Berkas		
4	Penyusunan / Pencetakan Naskah Perizinan	Sedang Diproses	24-09-2024, 14:27:30	24-09-2024, 14:27:30	/	Insert	Pemindahan Izin		
5	Penyerahan Izin / Pengambilan Berkas	Selesai	24-09-2024, 14:27:30	24-09-2024, 14:27:30	/	Insert	Arsip		
Total Pengerjaan				17 Menit					
Showing 1 to 5 of 5 entries									



+62 812-9633-3389



3/10/2024

Selamat sore pak/bu, saya caroline, dapat no wa ini dari mba Errina MPP tarakan, saya mau konsultasi terkait izin usaha,

16.05

Saya mau tanya, ini kan saya mau urus izin usaha untuk bikin badan usaha terkait ekspor di tarakan pak/bu. Tapi untuk alamat badan usahanya kalau menggunakan alamat di sumatra bisa tidak ya?

16.12

Saya sempat ke notaris juga, dan dari notaris katanya ga ada masalah untuk akta pendiriannya walau alamat di sumatra, tapi untuk izin usahanya kira2 gimana ya, apakah tetap bisa pak/bu?

16.14

selamat sore, untuk badan usahanya sdh terbentuk atau masih akan dibuat bu? ataukah akan membuat cabang badan usaha?

16.32 ✓✓

+62 812-9633-3389

Saya sempat ke notaris juga, dan dari notaris katanya ga ada masalah untuk akta pendiriannya walau alamat di sumatra, tapi untuk izin usahanya kira2 gimana ya, apakah tetap bisa pak/bu?

benar bu, sebenarnya tdk ada masalah..akan tetapi nanti menyesuaikan lg dg persyaratan ataupun ketentuan pada sistem OSS 🙏 dan biasanya sesuai aturan kita di Kaltara harus membuat NPWP Kaltara

16.35 ✓✓

Anda

selamat sore, untuk badan usahanya sdh terbentuk atau masih akan dibuat bu? ataukah akan membuat cabang badan usaha?

Masih proses mau buat untuk badan usahanya

18.07

Anda

benar bu, sebenarnya tdk ada masalah..akan tetapi nanti menyesuaikan lg dg persyaratan ataupun ketentuan pada sistem OSS 🙏 dan biasanya sesuai aturan kita di Kaltara harus ...

Jadi kalau alamatnya dikasi alamat luar kota tidak masalah ya, asal dibuat npwp badan usahanya tetap di kaltara?

18.08

Anda

benar bu, sebenarnya tdk ada masalah...akan tetapi nanti menyesuaikan lg dg persyaratan ataupun ketentuan pada sistem OSS 🙏 dan biasanya sesuai aturan kita di Kaltara harus ...

Sama untuk ketentuan sistem di OSSnya apa aja ya kalau boleh tau?

18.09

Oh iya sorry ini aku bicara dengan bapak/ibu siapa ya kalau boleh tau?

4/10/2024

+62 812-9633-3389

Sama untuk ketentuan sistem di OSSnya apa aja ya kalau boleh tau?

coba saja akses oss.go.id bu, krna terkait ekspor/impor merupakan kwenangan Pemerintah Pusat 🙏

08.29 ✓✓

+62 812-9633-3389

Oh iya sorry ini aku bicara dengan bapak/ibu siapa ya kalau boleh tau?

ini merupakan call center DPMPTSP (bidang Perizinan) jadi semua pegawai pelayanan bisa mengakses bu

08.29 ✓✓

di buat saja dulu badan usahanya, nanti membuat cabang badan usaha ke notaris baru pengajuan izin ke oss, nanti bisa dibantu notaris juga bu, kalau mengalami kesulitan saat pngajuan nnti bisa kami bantu juga

08.33 ✓✓

Anda

coba saja akses oss.go.id bu, krna terkait ekspor/impor merupakan kwenangan Pemerintah Pusat 🙏

Ok baik nanti saya cek fi web trsbut

17.55

Anda

di buat saja dulu badan usahanya, nanti membuat cabang badan usaha ke notaris baru pengajuan izin ke oss, nanti bisa dibantu notaris juga bu, kalau mengalami kesulitan saat ...

Sorry saya kurang ngerti poin yang ini, ini kan saya tanya yang soal alamatnya karena lagi on process buat badan usahanya, namun terkendala karena tidak ada alamat kantor di kalimantan. Dari notaris katanya ga ada masalah untuk akta pendirian, namun notaris ragu nanti jadi ada kendala di proses izin usahanya. Jadi itu pak/bu yang mau saya tanya, kalau izin usahanya kira-kira ga masalah tidak ya menggunakan alamat luar kota untuk pembuatan badan usahanya? Tapi bukan untuk cabang..

18.04

7/10/2024

+62 812-9633-3389

Sorry saya kurang ngerti poin yang ini, ini kan saya tanya yang soal alamatnya karena lagi on process buat badan usahanya, namun terkendala karena tidak ada alamat kantor di kalimanta...

bisa aja sih mbaa, nnti d OSS juga akan diarahkan untuk membuat badan usaha cabang, akan tetapi tergantung lagi badan usaha ini bergerak di bidang perdagangan atau apa mba?

08.23 ✓✓

di sistem OSS bahasanya kantor cabang administrasi mba

08.23 ✓✓

Ok kalau gitu berarti bisa ya saya buat dulu badan usahanya, terkait izin usahanya nanti kalau memang ada kendala bisa dikonsultasikan kembali ke dpmptsp kaltara ya?

15.39

SELASA

bisa..silakan mba

07.07 ✓✓

PT. DAMADU CAHAYA MANDIRI

JL.TRANS KALIMANTAN-POROS TANAH KUNING - KAB BULUNGAN,
DESA BINAI KEC. TANJUNG PALAS TIMUR. PROPINSI KALIMANTAN UTARA.
TEL(0853-1438-1220). KODE POS: 77215

Nomor : 022/DMD/X/2024

Lampiran : 1 (Berkas)

Perihal : Permohonan Fasilitasi Musyawarah PT. Damadu Cahaya Mandiri dan PT. Moa Maju Kurnia Utama (Konsesi)

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Utara

Di -

Tempat

Sehubungan dengan perihal diatas kami memohon agar difasilitasi untuk melakukan musyawarah & Mufakat antara PT. Damadu Cahaya Mandiri dengan PT. Moa Maju Kurnia Utama Sehingga mendapatkan Penyelesaian bersama.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bulungan, 14 Oktober 2024




Salamet
Direktur

NOTULEN

Pimpinan Rapat	: Drs. Junaid
Notulen	: Sirajuddin, SE
Hari/Tanggal	: Rabu, 16 Oktober 2024
Tempat	: Ruang Rapat Lantai 1 DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
Acara	: Rapat Fasilitasi Penyelesaian permasalahan pada PT. Damadu Cahaya Mandiri dan PT. MOA Maju Kurnia Utama
Peserta	: 1. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara 2. DESDM Provinsi Kalimantan Utara 3. PT. Damadu Cahaya Mandiri 4. PT. MOA Maju Kurnia Utama Bersama 5. Pemuda Panca Marga

A. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

1. Kami menerima surat dari PT. Damadu Cahaya Mandiri untuk difasilitasi pertemuan dengan PT. Moa Maju Kurnia. Kemudian kami harapkan nantinya PT. Damadu Cahaya Mandiri dapat menyampaikan maksud dari surat permintaan fasilitasi tersebut serta kronologi permasalahan dengan PT. MOA. Namun tentunya kita berharap, kita dapat melakukan diskusi ataupun musyawarah secara kekeluargaan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Kami sebagai dinas pembina dalam hal ini bidang pengawasan tentu akan mendukung adanya solusi yang dapat disepakati bersama. Kemudian jika saja permasalahan ini nantinya diluar dari kewenangan kami, kami dapat melakukan koordinasi kepada pihak terkait dan BKPM RI.
2. Pada OSS-RBA adanya 2 proyek dengan KBLI yang sama. Pada Proyek pertama nilai rencana usaha sebesar Rp. 400.000.000 dan Proyek kedua nilai rencana usaha lebih dari 5 Miliar. Dalam hal kami harap penjelasan dari PT. Damadu Cahaya Mandiri terkait 2 proyek tersebut yang manakah efektif berjalan saat ini.

B. PT. Damadu Cahaya Mandiri

1. Menyikapi terkait perjanjian antara PT. Damadu Cahaya Mandiri dan PT. MOA Maju Kurnia Utama Bersama yang dilaksanakan pada manajemen lama tidak diindahkan
2. Bahwa pada perjanjian tersebut jika ada perpanjangan kegiatan usaha dilakukan dengan persetujuan/kesepakatan dengan PT. MOA Maju Kurnia Utama Bersama. Sementara yang kami ketahui adanya surat yang dilayangkan dari PT. MOA Maju Kurnia Utama Bersama kepada Dians ESDM untuk tidak dilakukan

perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) pada PT. Damadu Cahaya Mandiri.

3. Luas keseluruhan lahan yang menjadi permasalahan seluas 50 Ha yang berada di wilayah PT. MOA Maju Kurnia Bersama. Kemudian pada lahan 5 Ha yang masuk dalam perjanjian pemanfaatan lahan bersama (PPLB), kami ingin mengetahui Apakah kegiatan tersebut dapat diperpanjang atau lahan tersebut dapat di ganti rugi.
4. Kegiatan usaha PT. Damadu Cahaya Mandiri saat ini aktif beroperasi.
5. Kami telah bersurat kepada PT. MAO Maju Kurnia Bersama melalui Bapak Idris terkait permasalahan ini.
6. Tujuan utama kami agar dapat melakukan musyawarah pada manajem baru PT. MOA Maju Kurnia Bersama karena selama ini sulit sekali dapat bertemu untuk membahas permasalahan ini.
7. Betul kami membenarkan pada pembebasan lahan dilapangan melalui tim verifikasi yang diketahui/melibatkan camat dan Kepala Desa.
8. Harapan kami juga agar PT. MOA Maju Kurnia Bersama lebih aktif kepada masyarakat terkait pembebasan lahan.
9. Pada OSS-RBA yang kami maksud yaitu pada KBLI 08105 (Penggalian Tanah dan Tanah Liat) dengan rencana usaha Rp. 400.000.000 dengan luas 8.3 Ha.

C. PT. Moa Maju Kurnia Bersama

1. Bahwa selama ini tidak ada surat yang kami terima dari PT. Damadu Cahaya Mandiri terkait permasalahan tersebut.
2. Terkait permasalahan ini tentu kami akan melakukan koordinasi pada pimpinan.
3. Terkait pembebasan lahan kami melakukan kerjasama atau melibatkan tim verifikator yang terdiri dari camat dan Kepala desa.
4. Dari yang kami ketahui, kami telah melakukan pembebasan lahan/ pembelian pada lokasi PT. Damadu Cahaya Mandiri, bisa bapak cek di kantor Desa.

D. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara

1. Terkait tumpang tindih lahan dapat terjadi pada kegiatan usaha batu bara dan pengelola lahan selama ada rekomendasi dari kementerian ESDM yaitu Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB).
2. Yang kami ketahui CV. Damadu atau PT. Damadu Cahaya Mandiri telah memiliki SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) namun dapat dicek kembali apakah masih aktif.
3. Terkait permasalahan tumpang tindih lahan yang menjadi permasalahan saat ini kami sarankan untuk diselesaikan kepada kedua belah pihak pada tahap

selanjutnya dikarenakan ini terkait bukti kepemilikan dan bukan kewenangan kami, kami hanya dapat memberikan penyampaiannya terkait perizinannya.

E. Pemuda Panca Marga

1. Untuk diketahui kami Pemuda Panca Marga bermitra dengan PT. Damadu Cahaya Mandiri yang rata-rata merupakan pemilik lahan. Mohon maaf kami selaku putra daerah tentu berharap apa yang menjadi hak kami dapat kami miliki. Sehingga kami berharap pada PT. Moa Maju Kurnia Bersama untuk dapat memperhatikan hak-hak kami disana.

F. Kesimpulan

1. Akan dilakukan pertemuan lanjutan pada PT. Damadu Cahaya Mandiri, PT. Moa Maju Kurnia Bersama dan Tim Verifikator pembebasan lahan termasuk (Camat dan Kades) di Desa Sajau Hilir untuk membahas terkait kepemilikan lahan dan perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) serta lainnya.
2. Hasil dari pertemuan tersebut untuk dapat disampaikan pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal, Data
dan Sistem Informasi

Drs. Junaid
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19671231 199312 1 004











+62 852-1675-0634
online



+62 852-1675-0634

Marketing Legal Hesti

Akun bisnis • Bergabung Agustus, 2019

Blokir

Tambah

Pagi pak 10.17

selamat siang
Ada yg bisa dibantu? 15.52 ✓✓

Pak izin lujptl saya belum juga terbit
sudah lama di OSS, mohon segera
diterbitkan 🙏

16.13



sudah terverifikasi sejak 07 oktober
tapi belum juga terbit pak, mohon
dibantu 🙏

16.14



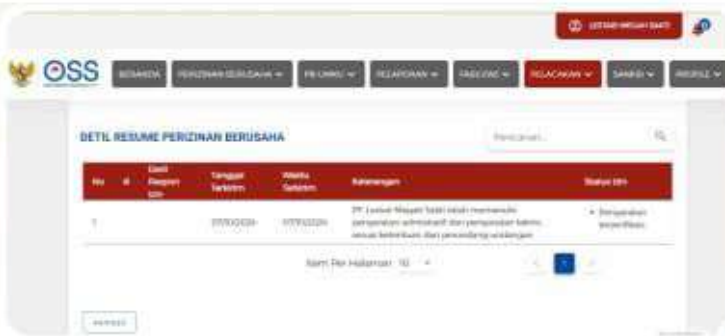
Ketik pesan





+62 852-1675-0634

online



sudah terverifikasi sejak 07 oktober
tapi belum juga terbit pak, mohon
dibantu 🙏

16.14

Hari ini

Siang pak, mohon info dan
konfirmasi

14.41

Siang Ibu
Info sementara kami dapat dari bagian
back office perizinan, izin IUJPTL
PT.LESTARI MEGAH SAKTI sampai
sekarang masih dalam Proses

Nanti akan kami coba telusuri lagi 🙏

14.59 ✓✓

tapi tinggal menunggu terbit ya bu?

15.00

Info masih menunggu approved Kadis
saat ini 🙏

15.52 ✓✓

mohon di followup/disegerakan ya bu,

15.59



Ketik pesan





+62 811-8017-102



+62 811-8017-102

septi dwi

Akun bisnis • Bergabung September, 2020

 **Blokir**

 **Tambah**

19 Oktober 2024



Panggilan suara tak terjawab

Ketuk untuk menelepon balik 10.13

Selamat pagi, mohon maaf sebelumnya
Saya Septi sedang pengurusan IUJPTL,
untuk persyaratan sudah terverifikasi
tapi kenapa belum terbit ya pak?

10.14

21 Oktober 2024

Selamat pagi
silahkan sampaikan nama perusahaan
dan tanggal awal pengurusan ijin nya,
biar kami telusuri terlebih dahulu 🙏😊

08.40 ✓✓

Selamat pagi, untuk PT Lestari megah
sakti. Waktu upload persyaratan tanggal
7 oktober 2024

10.16

Mohon untuk segera dicek 🙏

10.16



Ketik pesan



22/10/2024

10.14

10.14





Jalan Rambutan Gedung Gadis II Lantai I

Website: [www.http://dpmpstp.kaltaraprov.go.id](http://dpmpstp.kaltaraprov.go.id) Email: kajianpengaduan2018@gmail.com

TANJUNG SELOR - KALIMANTAN UTARA 77212

FORMULIR PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

HAL YANG DIADUKAN :

Permohonan hingga sampai saat ini belum selesai.

Permohonan awal bulan Agustus (2 Agustus 2024)

Tanjung Selor, 28 Oktober 2024

Petugas,

Pelappor,

28/10/2024
m kg R.A.L.

Pelapor,
(11:20)



085352217708







+62 852-4599-4783



SELASA

🔒 Pesan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Klik untuk info selengkapnya.

Selamat sore, izin berkonsultasi 15.46

Apa saja syarat izin galian batu? 15.46

Dari Dewi 15.46

RABU

Pagi..Batu apa ya mba? 07.17 ✓✓

Batu gunung 07.52

Ada juga sirtu 07.53

permohonan melalui [Oss.go.id](https://oss.go.id) ya bu, dengan pemilihan KBLI 08109 ya bu.. 07.57 ✓✓

nnti persyaratannya ada tertera distu ya bu 07.57 ✓✓

Baik terima kasih atas informasinya 10.14



Assalamualaikum
Selamat siang pak
Pak saya mau tanya untuk iup penjualan
pt berkab benuanta konstruksi
bagaimana infonya pak

11.26

Hari ini

Waalaikumsalam
Selamat Pagi Bapak
sebentar akan kami tracking ke bagian
perizinan dulu ya Bapak 🙏

Untuk data awal apa benar pengajuan
IUP penjualan PT. BERKAB BENUANTA
KONTRUKSI ke DPMPTSP pada tanggal
22 Agustus 2024 dan blm ada Info lbh
lanjut sampai sekarang?

07.58 ✓✓

Siap, betul pak tanggal 22 agustus 2024
kami mengajukan belum ada infonya
sampai sekarang
Kami butuh iup nya untuk pengurusan
tersus secepatnya pak mohon
bantuannya pak 🙏

08.01

Baik Bapak, akan kami teruskan ke
atasan kami utk segera ditindaklanjuti,
mohon maaf sebelumnya
Akan kami infokan kembali jika sudah
ada arahan lebih lanjut dari atasan kami
🙏

08.06 ✓✓



Ketik pesan





+62 813-4651-4100



termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.



+62 813-4651-4100

~ Dibyo

Bukan kontak • Tidak ada grup yang sama

 **Fitur keamanan** **Blokir** **Tambah**

Kemarin

Selamat sore, sy pelaku usaha CV. JOUVENIL AGRO LESTARI dr NUNUKAN, sesang mengurus IUP kode KBLI 01270 utk penangkar kopi dan kakao, kami sdh memenuhi persyaratan bahkan pertek dr dinas pertanian propinsi namun sampai sekarang belum terbit sertifikat standarnya 🙏🙏🙏

17.44



Ketik pesan



[BERANDA](#)[PERIZINAN BERUSAHA ▾](#)[PB-UMKU ▾](#)[PELAPORAN ▾](#)[FASILITAS ▾](#)[PELACAKAN ▾](#)[SANKSI ▾](#)[PROFILE ▾](#)

Nama Usaha/Kegiatan : Jasa Pertambangan
Alamat : Hauling Road PT MA KM 5
Provinsi : Kalimantan Utara

Kabupaten atau Kota : Kab. Malinau
Kecamatan : Malinau Selatan
Kelurahan : Langap

[Ajukan Perizinan Berusaha UMKU](#)

No	Nama Perizinan Berusaha UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri Deskripsi Kegiatan Usaha: Memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi atau berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW. ID Izin: I-202410241333015204392	Gubernur Kalimantan Utara-Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Utara	24/10/2024	Izin Belum Terbit	Persyaratan terverifikasi

[Lihat Data Persyaratan](#)[Kembali](#)

Item Per Halaman 10 ▾



1



▲ No	📄 No Pendaftaran Tanggal Permohonan Asal Permohonan	📄 Pemohon	📄 Jenis Izin Objek Izin/Lokasi Izin	📄 No Surat Keputusan Tanggal Surat Keputusan	📄 Status	📄 Aksi
50	0044917001102024036 25 Oktober 2024 DPMPTSP Prov. Kaltara	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Persetujuan Perizinan Berusaha (OSS) Sektor ESDM Hauling Road PT MA KM 5	500.16.7.2/45/PPB.ESDM/DPMPPTSP.III/X/2024 25 Oktober 2024	Template 'SP BSR' Belum Dicetak	   



+62 822-2557-7890



28/11/2024

Selamat pagi pak 09.39

Dari dishub provinsi kelengkapan syaratnya sudah selesai pak 09.40

Tahap selanjutnya ke PTSP infonya 09.40

Mohon dibantu data NIB, Nama Perusahaan, KBLI, dan Nomor Kegiatan Usahanya bapak 14.18 ✓✓

agar kami melakukan pengecekan 14.18 ✓✓

21062301083690001 14.21

52240 - Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) 14.21

PT. Samudera Citrabara Maritim 14.23

Baik bapak, setelah dilakukan pengecekan status dari dishub provinsi persyaratan terverifikasi
Saya follow up bagian perizinan dpmptsp ya pak 14.25 ✓✓

Anda

Baik bapak, setelah dilakukan pengecekan status dari dishub provinsi persyaratan terverifikasi...

Baik pak 🙏

14.26

Selamat sore bapak, info dari back office perizinan, masih dalam proses ya pak 15.19 ✓✓

Anda

Selamat sore bapak, info dari back office perizinan, masih dalam proses ya pak

Di dishub provinsi

15.21



Ketik pesan





+62 822-2557-7890



28/11/2024

+62 822-2557-7890

Di dishub provinsi

Di dpmptsp pak

15.21 ✓✓

Anda

Di dpmptsp pak

Kantor nya dimna

15.22

Ya pak saya harus menghadapkah

15.22

+62 822-2557-7890

Kantor nya dimna

Gedung gadis lantai 1 dpmptsp provinsi

15.22 ✓✓

+62 822-2557-7890

Ya pak saya harus menghadapkah

Saya sudah follow up, info dari back office sedang diproses bapak

15.22 ✓✓

Siap pak

15.23

Saya nunggu info ya pak terima kasih 🙏

15.23

Baik Bapak. sama sama

15.28 ✓✓

KAMIS

Anda

Saya sudah follow up, info dari back office sedang diproses bapak

Ya pak saya sudah ada info terbaru



Ketik pesan





+62 822-2557-7890



KAMIS

Anda

Saya sudah follow up, info dari back office sedang diproses bapak

Ijin pak apa sudah ada info terbaru

13.59

Masih dalam proses pimpinan ya pak 15.18 ✓✓

Anda

Masih dalam proses pimpinan ya pak

Saya perlu menghadap pimpinan kah pak 15.21

JUMAT

Pak mohon info apa saya harus menghadap dan waktunya kapan 14.17

SABTU

Selamat siang pak 11.19 ✓✓

Bapak, Senin saya menghadap langsung ke back office perizinan ya pak Diedit 11.19 ✓✓

Mengenai prosesnya Diedit 11.19 ✓✓

Siang, baik pak terima kasih 13.01

Data Permohonan

No Pendaftaran	0051412301112024034
Pemohon	SAMUDERA CITRABARA MARITIM
Jenis Izin	Persetujuan Perizinan Berusaha (OSS) Sektor Perhubungan
Jenis Permohonan	Izin Baru
Tanggal Pendaftaran	26 November 2024, Pukul : 07:57:25
Target Durasi	14 Hari

Penugas Front Office : TAUFIK HIDAYAT

Search:

No	Menu	Durasi Pengerjaan	Waktu Awal	Waktu Akhir	User / Nama	Status	Aktivitas
3	Pertimbangan Teknis / Evaluasi Berkas	10 Detik	26-11-2024, 15:18:14	26-11-2024, 15:18:24	putra / PUTRA CIPTA PRATAMA	Update	Penyusunan Berkas
1	Menerima dan Memeriksa Berkas	14 Menit	26-11-2024, 07:43:10	26-11-2024, 07:57:38	taufik / TAUFIK HIDAYAT	Update	Kirim Ke Pelayanan
4	Penyusunan / Pencetakan Naskah Perizinan	2 Minggu, 2 Hari, 13 Menit	26-11-2024, 15:18:24	12-12-2024, 15:31:57	/	Update	Penyerahan Izin
2	Entri Data	7 Jam, 20 Menit	26-11-2024, 07:57:38	26-11-2024, 15:18:14	putra / PUTRA CIPTA PRATAMA	Update	Entry Data
5	Izin Ditolak	Sedang Diproses	12-12-2024, 15:31:57	12-12-2024, 15:31:57	/	Insert	
6	Penyerahan Izin / Pengambilan Berkas	Selesai	26-11-2024, 15:18:24	26-11-2024, 15:18:24	/	Insert	Arsip
Total Pengerjaan		2 Minggu, 2 Hari, 7 Jam, 48 Menit					

Showing 1 to 6 of 6 entries

FirstPreviousNextLast



EnRico Oss Pts



9 Desember 2024

